

Dr. Rifki Rosyad, MA.

Dr. Dian, M.Ag.



**PEACE**

# Model Pendidikan Perdamaian Di Sekolah Pondok Peacesantren Garut



**Prodi S2 Studi Agama-Agama**  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
2022

# **Model Pendidikan Perdamaian di Sekolah Pondok Peacesantren Garut**

Dr. Rifki Rosyad, MA.

Dr. Dian, M.Ag.



Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Bandung

2022

## **Model Pendidikan Perdamaian di Sekolah Pondok Peacesantren Garut**

### **Penulis:**

Dr. Rifki Rosyad, MA.

Dr. Dian, M.Ag.

**ISBN:** 978-623-5401-03-4

**ISBN:** 978-623-5401-02-7 (PDF)



### **Editor:**

M. Taufiq Rahman

### **Desain Sampul dan Tata Letak:**

Paelani Setia

### **Penerbit:**



**PRODI S2 STUDI AGAMA-AGAMA**  
**UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
Jalan Soekarno-Hatta, Cimincrang, Gedebage,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40141

### **Redaksi:**

Ged. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. Soekarno Hatta Cimincrang Gedebage Bandung 40292

Telepon : 022-7802276

Fax : 022-7802276

E-mail : [s2saa@uinsgd.ac.id](mailto:s2saa@uinsgd.ac.id)

Website : [www.pps.uinsgd.ac.id/saas2](http://www.pps.uinsgd.ac.id/saas2)

Cetakan pertama, Mei 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa  
ijin tertulis dari penerbit.

## **PRAKATA**

Syukur sebesar-besarnya kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang dengan izin-Nyalah buku ini dapat terselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Buku ini merupakan hasil penelitian pada Lembaga Pendidikan yang mempromosikan perdamaian dalam pengajarannya, yaitu di Peaceantren Welas Asih, Garut. Kegiatan pendidikan perdamaian mempromosikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan membantu orang baik untuk mencegah terjadinya konflik, menyelesaikan konflik secara damai, atau menciptakan kondisi sosial yang kondusif untuk perdamaian. Nilai-nilai inti non-kekerasan dan keadilan sosial merupakan inti dari pendidikan perdamaian. Non-kekerasan diwujudkan melalui nilai-nilai seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan dan kepercayaan. Keadilan sosial diwujudkan dengan prinsip kesetaraan, tanggung jawab, dan solidaritas.

Untuk buku ini, yang pertama-tama mesti diberikan ucapan terima kasih adalah pada pihak Peaceantren, yaitu Irfan Amali, MA yang mengizinkan para peneliti bolak-balik mencari data. Terimakasih juga disampaikan kepada pihak LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) UIN Sunan Gunung Djati Bandung atas kesempatan dan bimbingannya dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, terimakasih juga dihaturkan pada Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah mendukung untuk menerbitkan penelitian ini berupa buku. Semoga buku ini dapat menyumbang pengembangan pendidikan masyarakat seperti yang diniatkan mereka yang terlibat dalam kelembagaan yang ditelitinya.

Bandung, 27 Mei 2022

Para Peneliti

## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 Urgensi Pendidikan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Multikultural .....	1
A. Pendidikan Karakter.....	2
B. Pendidikan Multikultural .....	8
BAB 2 Pendidikan Perdamaian: Gagasan dan Konsep Umum.....	18
A. Pendidikan Perdamaian.....	20
B. Pendidikan Perdamaian dalam Pendidikan Islam .....	24
BAB 3 Model Pendidikan Perdamaian dalam Lintas Sejarah Indonesia .....	32
A. Nilai Pendidikan Pesantren untuk Perdamaian .....	32
B. Pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur .....	34
BAB 4 Kurikulum dalam Pendidikan Perdamaian .....	39
A. Kurikulum Resmi ( <i>Planned</i> ).....	39
B. Kurikulum Pendidikan Perdamaian dalam Pendidikan Islam.....	47
C. Pengajaran Pendidikan Perdamaian dalam Pendidikan Islam.....	51
D. Strategi Implementasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Perdamaian dalam Pendidikan Islam.....	53
Bab 5 Kiat Sekolah Wujudkan Pendidikan Perdamaian .....	57
A. Peranan guru sebagai transformasi sosial menuju budaya damai .....	57
B. Lembaga Pendidikan Sebagai Gerakan Sosial Perdamaian .....	60
Bab 6 Pendidikan Perdamaian Melalui 12 Nilai Perdamaian .....	64
A. Konflik dan Resolusi Konflik .....	64
A. Implementasi 12 Nilai Perdamaian dalam Nilai-nilai Perdamaian .....	67
Bab 7 Pendidikan Perdamaian di Peacesantren Welas Asih Garut.....	74
B. Profil Peacesantren Welas Asih Garut .....	74
C. Bunda Academy (WAABA).....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	80

## **BAB 1 Urgensi Pendidikan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Multikultural**

Saat ini, pendidikan karakter menjadi isu utama pendidikan nasional. Hal ini tampak pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini (2 Mei 2011) yang memilih tema “Pendidikan Karakter sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa; Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti”. Bahkan dalam Menteri Diperkenalkan Hardiknas tersebut, Pendidikan Nasional M. Nuh menegaskan bahwa mulai tahun ajaran 2011/2012, pendidikan berbasis karakter akan sebagai gerakan nasional, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Perguruan Tinggi, di dalamnya pendidikan nonformal dan informal.

Karakter yang ingin dibangun, menurut Mendiknas, bukan hanya berdasarkan karakter mulia semata, tetapi secara bersamaan akan membangun karakter kemuliaan sebagai bangsa.1Sebelumnya, tentang pentingnya pendidikan karakter telah banyak disuarakan oleh pemerhati pendidikan, khususnya dalam forum ilmiah. Universitas Muhammadiyah yah Malang (UMM), misalnya, pada tanggal 30 April 2011 mengadakan seminar bertema “Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Kearifan Lokal”. Demikian pula Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, pada tanggal 1 Mei 2011 mengadakan Rembuk Nasional dengan tema “Membangun Karakter Bangsa dengan Berwawasan Kebangsaan”. Sehari sebelum digelar di UPI tersebut, di Ruang Rapat Komisi X DPR-RI, diadakan Rapat Kerja yang membahas tentang pendidikan karakter. Hadir dalam rapat tersebut selain 25 anggota komisi, adalah Menkokesra, Mendiknas, Menag, Menbudpar, Menpora, Wamendiknas, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta para pejabat eselon 1 kementerian terkait. Dalam Rapat Kerja tersebut dibahas mengenai kesiapan masing-masing pihak terkait pelaksanaan pendidikan karakter.

## A. Pendidikan Karakter

Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, *charassein*, yang berarti mengukir. Dengan demikian, membentuk karakter diibaratkan seperti mengukir di atas batu yang pelaksanaannya tidak mudah. Dari makna asal tersebut kemudian pengertian karakter berkembang menjadi tanda khusus atau pola perilaku (pola perilaku individu ... konstitusi moralnya). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; watak. Pengertian tidak jauh berbeda ditemukan dalam Oxford Dictionary, yang mendefinisikan karakter sebagai *the mental and moral quality different to an individual* (kualitas mental dan moral yang khas pada seseorang); sifat khas sesuatu (sifat khas sesuatu); kualitas menjadi individu dengan cara yang menarik atau tidak biasa (kualitas individu dalam pandangan yang menarik atau tidak biasa); kekuatan dan orisinalitas dalam sifat seseorang (kekuatan dan orisinalitas dalam diri seseorang); nama baik seseorang (reputasi yang baik seseorang) (Darmadi, 2009).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa karakter merupakan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Atau karakter dapat pula dinyatakan sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan menggambarkan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, karakter berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi 'positif', bukan netral. Jadi, 'orang berkarakter' adalah orang yang memiliki kualitas moral positif.

Adapun pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, komunikasi, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan memperhatikan makna karakter dan pendidikan, maka pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan potensi peserta didik dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa agar mereka

memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warganegara. Sedangkan menurut Thomas Lickona, sebagaimana dikutip Suyatno, pendidikan karakter adalah upaya terencana dalam membantu seseorang untuk memahami, peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika/moral.

### **Mengapa Pendidikan Karakter Penting?**

Apa pentingnya pendidikan karakter? Selama ini peserta didik dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan telah mendapat pendidikan agama dan pendidikan kewargaan. Bahkan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, idealnya adalah “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Diakui atau tidak, fakta-fakta perilaku dalam dua puluh tahun terakhir ini warga masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur. Misalnya, sikap mementingkan diri sendiri; menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk dengan cara-cara yang melanggar hukum seperti korupsi dan memeras warga masyarakat; budaya memilih jalan pintas; budaya konflik dan saling curiga; saling mencela/menja-tuhkan; budaya mengerahkan otot (massa); dan budaya tidak tahu malu (Koesoema, 2015).

Khusus dunia pendidikan, perilaku menyimpang di kalangan pemuda/pelajar semakin meningkat. Misalnya, banyak dari mereka yang terjerat narkoba, pergaulan bebas, tawuran dan premanisme. Di samping itu, sejak kebijakan ujian nasional diterapkan sebagai standar kelulusan, perilaku tidak jujur/ngrepek saat ujian telah dilakukan secara berjamaah oleh guru, siswa dan pihak terkait. Demikian pula, penyelewengan dan penyimpangan penggunaan anggaran pendidikan di tingkat satuan pendidikan menjadi berita yang media setiap saat.



Thomas Lickona, seorang pendidik dari Cortland University, yang merupakan karakter sebagai Bapak Pendidikan Karakter Amerika, mengungkapkan bahwa sebuah bangsa sedang jurang kehancuran, jika memiliki sepuluh tanda-tanda zaman, yaitu, kekerasan menuju ke kelas remaja; membudayanya ketidak jujuran;berkem-bangnya sikap fanatik terhadap kelompok (*peer group*); semakin rendah rasa hormat kepada orang tua dan guru; semakin kaburnya moral baik dan buruk; penggunaan bahasa yang memburuk; perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas; rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara; menurunnya etos kerja; dan adanya rasa saling curiga dan kurang memperhatikan antara sesama. Apa yang diungkapkan Lickona tersebut dapat dengan mudah di masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter di sekolah yang selama ini dikembangkan melalui pendidikan agama dan pendidikan kewargaan, telah gagal membentuk peserta didik yang berkarakter. Mengapa gagal? Karena pendidikan agama dan kewargaan hanya pada tingkat pengenalan norma atau nilai-nilai, dan belum pada tingkat internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pendidikan agama dan kewargaan lebih merupakan aspek kognitif dan perkembangan aspek efektif dan psikomotor yang justru menjadi inti pembelajaran. Jika dibiarkan terus menerus maka antara pengetahuan dan perilaku semakin melebar.

Fenomena krisis multidimensi dan kelemahannya agama dan kewargaan pendidikan tersebut didukung bahwa memperkuat pendidikan karakter menjadi mutlak agar generasi penerus kepemimpinan bangsa dapat dilakukan dari kerusakan moral dan krisis multidimensi.

## **Landasan dan Sumber Pendidikan Karakter**

Landasan dan sumber pendidikan karakter bangsa yang ingin dikembangkan melalui lembaga pendidikan digali dari nilai-nilai yang selama ini menjadi karakter bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai agama, Pancasila, budaya bangsa, dan tujuan pendidikan nasional.

1. Agama.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasarkan pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

2. Pancasila

Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terkandung dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, budaya, dan seni. Pendidikan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

3. Budaya

Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak berdasarkan nilai-nilai budaya yang diakui itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam mempersembahkan makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan menjadi sumber nilai dalam pendidikan karakter bangsa.

4. Tujuan Pendidikan Nasional

Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur (Darmadi, 2009).

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.”

Dari bunyi pasal tersebut, setidaknya terdapat lima dari delapan potensi peserta didik yang implementasinya sangat lekat dengan tujuan pembentukan pendidikan karakter. Kelekatannya inilah yang menjadi dasar hukum pentingnya pelaksanaan pendidikan karakter.

### **Nilai-Nilai Pendidikan Karakter**

Terdapat sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: pertama, karakter cinta Tuhan dan penemuan-Nya; kedua, mandiri dan tanggung; ketiga, kejujuran/amanah, diplomatis; keempat, rasa hormat dan santun; kelima, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama; ada, percaya diri dan pekerja keras; ketujuh, kepemimpinan dan keadilan; kedelapan, baik dan rendah hati, dan; kesembilan, karakter toleransi, kesatuan, dan kesatuan.

Sementara itu, berdasarkan nilai-nilai agama, Pancasila, budaya, bendungan tujuan pendidikan nasional, Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional merumuskan delapan belas nilai-nilai yang perlu dikembangkan melalui pendidikan karakter, yaitu (Kemendiknas, 2010):

1. Religius; sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain
2. Jujur; perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam kutipan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi; sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin; tindakan yang menunjukkan tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja keras; perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif; berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7. Mandiri; sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis; cara berfikir, berpikir, dan bertindak yang menilai hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa ingin tahu; sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat kebangsaan; cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
10. Cinta tanah air; cara berfikir, perhatian, dan melakukan yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
11. Menghargai prestasi; sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghargai keberhasilan orang lain.
12. Bersahabat/Komunikatif; tindakan yang senang rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
13. Cinta damai; Sikap, kutipan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman di atas dirinya.
14. Gemar membaca; kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang bermanfaat bagi dirinya.
15. Peduli lingkungan; sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi.
16. Peduli sosial; sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
17. Tanggung-jawab; sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

### **Implementasi dan Strategi Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter harus ditumbuhkembangkan sejak dini dan berkelanjutan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga lingkungan

masyarakat luas. Lalu, bagaimana pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah? Proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa harus dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, dan melalui budaya sekolah. Dengan demikian, dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (stakeholder) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan kegiatan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Kriteria pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan adalah terbentuknya budaya sekolah, yaitu, tradisi, kebiasaan sehari-hari, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah yang berlandaskan nilai-nilai yang dikembangkan (Samani & Hariyanto, 2011).

Pendidikan karakter harus diajarkan secara sistematis dan holistik dengan menggunakan metode mengetahui yang baik, mencintai yang baik, dan melakukan yang baik. Mengetahui yang baik bisa mudah diajarkan karena hanya bersifat pengetahuan atau kognitif. Setelah mengetahui kebaikan yang ditumbuhkan mencintai kebaikan, yakni bagaimana seseorang merasakan dan mencintai kebajikan yang diajarkan, sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa seseorang mau melakukan kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah tumbuh rasa cinta dan kemauan untuk melakukan kebajikan, maka akan tumbuh perbuatan baik, kebiasaan melakukan kebajikan secara spontan. Inilah tujuan akhir pendidikan karakter, yakni terbentuknya pribadi yang secara spontan mampu melakukan kebajikan sesuai nilai-nilai yang diajarkan. Ini pula yang oleh para filosof muslim disebut akhlak, yaitu kemampuan jiwa untuk melahirkan suatu perbuatan secara spontan tanpa pemikiran dan pemaksaan.

## **B. Pendidikan Multikultural**

Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan budaya lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire, pendidikan bukan merupakan

menara gading yang berusaha mengembangkan realitas sosial dan budaya. Pendidikan, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya. Menurut L.H Ekstrand, ada 4 istilah yang setara dengan multikultural yaitu pendidikan antaretnis, pendidikan transkultural, pendidikan multietnis, dan pendidikan lintas budaya. Barry van Driel menambahkan istilah lain yakni pendidikan hak asasi manusia, pendidikan antarbudaya dan pendidikan inklusif. Istilah di atas menurut Ekstrand dan Driel memiliki pengertian yang sama yakni konsep pendidikan yang memberi kesempatan yang setara kepada semua peserta didik tanpa melihat keadaan fisik, intelektual, sosiol, emosional, bahasa dan kondisi yang lain (Baidhaw, 2005).

Secara etimologis, pendidikan multikultural terdiri dari dua kata yaitu kata “pendidikan” berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan dan cara mendidik. Disisi lain, pendidikan adalah transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan. Sedangkan multikultural, multi berarti banyak, beragam dan aneka sedangkan kultural berasal dari kata culture yang memiliki makna budaya, tradisi, kesopanan atau pemeliharaan.

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Definisi budaya menurut para ahli sangat beragam, namun dalam konteks budaya dilihat dari perspektif fungsi sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif budaya tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individu maupun secara budaya.

Secara terminologis, Calarry Sada mengutip tulisan Sleeter menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki empat makna (model), yakni: (1) pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural, (2) pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial, (3) pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat, dan (4) pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan.

M. Ainul Yaqin memahami pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diterapkan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan budaya yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi mudah. Pendidikan multikultural sekaligus melatih dan membangun karakter siswa agar mampu melihat demokratis, humanis dan plural dalam lingkungan mereka.

Mundzier Suparta dalam bukunya *Islamic Multicultural Education*, menyatakan definisi tentang pendidikan multikultural antara lain; (a) pendidikan multikultural adalah sebuah filosofi yang membentuk pada makna penting, legitimasi dan vitalitas Keragaman etnik dan budaya dalam kehidupan individu, kelompok maupun bangsa. (b) pendidikan multikultural adalah menginstitutionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan (*equality*), saling menghormati dan menerima, memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. (c) pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya; dalam hampir seluruh bentuk komprehensifnya. (d) pendidikan multikultural merupakan reformasi sekolah yang komprehensif dan pendidikan dasar untuk semua anak didik yang semua bentuk diskriminasi dan intruksi yang menindas dan hubungan antar pribadi di dalam kelas dan memberikan prinsip-prinsip demokrasi keadilan sosial (Suryana & Rusdiana, 2015).

Tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa dengan harapan mereka mempunyai wacana yang tidak hanya mampu membangun kecakapan dan keahlian siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan akan tetapi mampu menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya.

Di samping itu terdapat prinsip-prinsip pendidikan multikultural yaitu: (a) pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa.; (b) isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung

perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok; (c) materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat; (d) pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas; (e) Pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya mudah dipahami.

Adapun karakteristik pendidikan multikultural ada 3, antara lain (Wihardit, 2010):

1. Berprinsip pada demokrasi, persamaan dan keadilan Artinya semua anak (siswa) mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Menurut Dede Rosyada, tidak hanya sebatas memberikan kesempatan pendidikan tetapi harus mendapat perlakuan yang sama untuk mendapatkan pelajaran di kelas. Dengan begitu, mereka mendapat kesempatan untuk mencapai kompetensi dan keterampilan ilmiah sesuai dengan minatnya. Dalam perspektif Islam, doktrin yang mengandung prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan tertuang dalam Al-Qur'an: QS. al-Syura (42):38; al-Hadid (57): 25; al-A'raf (7):181. Ketiga ayat tersebut memberikan landasan moral bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam perkataan, sikap dan tindakan. Perlakuan adil di sini berkaitan dengan interaksi sosial antara umat Islam satu sama lain atau dengan non-Muslim.<sup>15</sup> Doktrin Islam tentang prinsip-prinsip demokrasi (*al-musyawahah*), kesetaraan (*al-musawah*), dan keadilan (*al-'adl*) telah dipraktekkan oleh Rasul untuk mengelola keragaman masyarakat di Madinah. Misalnya, Nabi membuat perjanjian tertulis yang dikenal dengan piagam Madinah. Piagam tersebut menetapkan bahwa semua penduduk Madinah memiliki status yang sama dalam kehidupan.
2. Berorientasi pada Kemanusiaan, Kebersamaan dan Perdamaian Orientasi kemanusiaan dalam pendidikan multikultural relevan dengan konsep *hablum min al-nas*. Konsep ini menempatkan manusia pada 2 posisi, yaitu *ahsanu taqvim* (makhluk terbaik) dan manusia harus tunduk pada hukum Tuhan. Kedua posisi tersebut melahirkan pentingnya menjaga kelangsungan hidup manusia. Hubungan baik antar manusia dalam perspektif Islam tidak hanya terkait dengan ras, suku, bahasa, budaya, dan agama, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas,



yaitu ras, suku, bahasa, budaya, dan agama lain secara bersamaan. Kebersamaan dipahami sebagai sikap seseorang terhadap orang lain, atau sikap seseorang terhadap masyarakat dan kelompok. Dalam perspektif Islam, kebersamaan ini relevan dengan konsep saling mengenal (ta'aruf) dan saling membantu (ta'awun). Kedua konsep ini tertuang dalam Al-Qur'an al-Hujurat (49):13 dan al-Maidah (5):2. Hal ini dijadikan landasan etis untuk membangun hubungan sosial yang baik dalam masyarakat yang majemuk di tengah-tengah masyarakat. Kedamaian hidup dalam suatu masyarakat dapat diwujudkan dengan menghindari terjadinya kekerasan, perang, dan tindakan mementingkan diri sendiri serta dengan menegakkan keadilan. Artinya, pendidikan multikultural bertugas membentuk pola pikir peserta didik dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis tanpa permusuhan, konflik, kekerasan dan egoisme.

3. Mengembangkan Sikap Mengakui, Menerima, dan Menghargai Keberagaman Dalam perspektif Islam, sikap menghargai kebhinekaan yang harus diterima, diakui dan dihargai sejajar dengan konsep al-ta'adudiyat (pluralisme) dan al-tanawwu' (keragaman) dalam Islam. Menurut Amir Husain, kebhinekaan adalah fitrah dan sunatullah yang mengandung pelajaran penting untuk berdialog dan bertoleransi (tasamuh) kepada berbagai pihak. Nabi memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Mekkah dan Madinah dengan berbagai suku dan agama seperti Kristen, Yahudi, Zoroastrianisme. Ia sering menggunakan metode dialog dengan mereka, agar Islam bisa hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat non-Muslim. Oleh karena itu, keberagaman bukanlah penghalang tetapi tantangan bagi kreativitas dalam memperkenalkan Islam.

### **Urgensi Pendidikan Multikultural**

- a. Sebagai sarana alternatif pemecahan konflik

Penyelenggara pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan intoleransi yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Spektrum kultural masyarakat

Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan divisi sumber. Saat ini, pendidikan multikultural memiliki dua tanggung jawab besar, yaitu: mempersiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan tanpa bangsa yang terdiri dari berbagai macam budaya. Pendidikan kebangsaan dan ideologi telah diberikan di perguruan tinggi, namun pendidikan multikultural belum diberikan dengan proporsi yang benar. Maka sekolah sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan pendidikan multikultural dengan model masing-masing sesuai dengan otonomi pendidikan. Menurut penulis, pendidikan multikultural tersebut sebaiknya lebih ditekankan pada mata pelajaran agama, kebangsaan, dan moral. Pada dasarnya model pembelajaran seperti itu memang sudah ada. Namun, hal itu masih sekedar teori dalam sedangkan prakteknya belum terlaksana dengan baik (Trianingih, 2017).

Hal itu terlihat dengan munculnya konflik yang terjadi pada kehidupan berbangsa saat ini dimana pemahaman toleransi masih sangat kurang. Hingga detik ini, jumlah siswa dan mahasiswa yang memahami makna budaya bangsa masih sangat sedikit. Padahal dalam konteks pendidikan multikultural, memahami makna dibalik realitas budaya suku bangsa merupakan hal yang esensial. Maka, penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil berbentuk pada diri siswa sikap hidup saling toleransi, tenggang rasa, tepo seliro, tidak bermusuhan dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, adat istiadat atau lainnya.

Menurut Stephen Hill, Direktur PBB bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya, UNESCO untuk kawasan Indonesia, pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil bila prosesnya melibatkan semua elemen masyarakat. Secara konkret, pendidikan ini tidak hanya melibatkan guru atau pemerintah saja, namun seluruh elemen masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya multi dimensi aspek kehidupan yang tercakup dalam pendidikan multikultural. Perubahan yang diharapkan dalam konteks pendidikan multikultural ini tidak terletak pada angka (kognitif) sebagaimana lazimnya penilaian keberhasilan pendidikan di negeri ini.

Namun, lebih dari itu yakni terciptanya kondisi yang nyaman, damai, toleransi dalam kehidupan masyarakat, dan tidak selalu muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan SARA. Bahkan ada yang mengatakan

bahwa hasil pendidikan multikultural tidak bisa diukur oleh waktu tertentu. Maka, di Indonesia sudah saatnya memberikan perhatian besar terhadap pendidikan multikultural. Secara tidak langsung, hal itu dapat memberikan solusi bagi permasalahan sosial dimasa mendatang.

b. Supaya siswa tidak tercerabut dari akar budaya

Pendidikan multikultural juga signifikan dalam membina siswa agar tidak tercerabut dari akar budaya yang ia miliki sebelumnya, takala ia berhadapan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi. Dalam era globalisasi saat ini, pertemuan antar budaya menjadi ancaman bagi anak didik. Untuk mensikapi pengetahuan realitas global tersebut, siswa memiliki pengetahuan dan pengetahuan yang cukup, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan global, termasuk aspek kebudayaan. Menurut Fuad Hasan, saat ini diperlukan langkah antisipatif terhadap tantangan globalisasi, utamanya dalam aspek kebudayaan. Sebab anak didik masa kinijauh berbeda dengan anak seusianya di masa lalu. Beragam budaya yang ada di negeri ini, berbaur dengan budaya asing yang kian mudah diperoleh melalui berbagai media, seperti televisi, internet, dll. IPTEK memperpendek jarak dan memudahkan persentuhan antar budaya. Dan kemungkinan terjadinya yang saling mempengaruhi budaya. Maka tantangan dalam dunia pendidikan kita saat ini sangat berat dan kompleks. Upaya antisipasi perlu dilakukan secara serius, jika tidak membuat ini bisa kehilangan arah, tercerabut dari akar budayanya sendiri.

Menurut H.A.R. Tilaar, pendidikan multikultural telah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar dalam membangun Indonesia baru. Menurutnya, pendidikan multikultural memerlukan kajian yang mendalam mengenai konsep dan praksis pelaksanaannya baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologi. Ada apabila kita melihat pengalaman negara-negara yang telah menerapkan pendidikan multikultural dalam masyarakat pluralistik serta terbuka di era globalisasi ini. Sebetulnya, realitas multikultural yang ada di indonesia merupakan kekayaan yang bisa menjadi model untuk mengembangkan kekuatan budaya. Maka, jelas bahwa kekayaan tersebut patut kita jaga dan lestarikan.

c. Sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional

Dalam melakukan pengembangan kurikulum sebagai titik tolak dalam proses belajar mengajar, pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting. Pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan pendekatan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengubah filosofi kurikulum saat ini pada yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan.
- 2) Teori kurikulum (konten kurikulum), harus berubah dari teori yang diartikan sebagai aspek substantif dari pengertian konten yang mencakup nilai moral, proses dan keterampilan (skill) yang harus dimiliki generasi muda.
- 3) Teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan Keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
- 4) Proses belajar yang dikembangkan untuk siswa harus berdasarkan proses yang memiliki daya bersaing secara kompetitif dengan kelompok lain.
- 5) Evaluasi yang digunakan meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan konten yang dikembangkan.

Alat evaluasi yang digunakan harus beragam sesuai dengan sifat, tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan. Indonesia sebagai negara majemuk perlu menyusun konsep pendidikan multikultural sehingga menjadi pegangan untuk memperkuat identitas nasional. Dengan cara ini diharapkan generasi muda setidaknya memiliki identitas nasional, sehingga mereka tidak mudah pecah belah, dan mampu bersaing di era globalisasi. Negara yang berpenduduk majemuk seperti Amerika, Australia, dan Kanada telah mengajarkan pendidikan multibudaya di sekolah formal dan informal. Menurut Hamid Hasan, masyarakat Indonesia memiliki Keragaman sosial budaya, aspirasi politik dan kemampuan politik. Keragaman ini juga menjadi pengaruh terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar, kemampuan siswa dalam proses belajar, serta mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar.

Para ahli pendidikan menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum. Ki Hajar Dewantara menyatakan kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Kebudayaan merupakan totalitas cara manusia dan mengembangkan pola

kehidupan sehingga ia tidak menjadi landasan dimana kurikulum dikembangkan tetapi menjadi target hasil pengembangan kurikulum. Dalam buku yang berjudul *Sociocultural Origins of Achievement*, Maehr (1974) mengatakan keterkaitan budaya dan bahasa, budaya dan persepsi, budaya dan keinginan berprestasi, serta budaya motivasi berprestasi, merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap siswa (Maes, 2020).

Studi Webb (1990) dan Burnet (1994) menunjukkan bahwa proses belajar siswa yang dikembangkan melalui budaya menunjukkan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk mempertimbangkan faktor budaya sebagai landasan dalam menentukan komponen, materi, proses, evaluasi, kegiatan belajar siswa. pengembangannya kurikulum ditingkat pusat, daerah, dan sekolah harus memanfaatkan budaya sebagai landasan kurikulum secara lebih sistematis.

Indonesia adalah negara kaya budaya seperti yang dinyatakan dalam motto nasional Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena proses pengembangan kurikulum harus memperhatikan keragaman budaya yang ada, seharusnya di Indonesia menggunakan pendekatan multikultural sebagai pengembang kurikulum. Menurut UU nomor 22 tahun 1999 dan No. 32/2004 tentang otonomi daerah tidak akan langsung menjadikan pendidikan multikultural berlaku dalam pengembangan kurikulum di Indonesia.

#### d. Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural

Dalam masyarakat multikultural ditegaskan ditegaskan masyarakat Indonesia yang beragam bukan hanyakan corak pada keanekaragaman suku bangsa, melainkan juga keanekaragaman budaya yang ada pada masyarakat. Eksistensi Keragaman tersebut tampak dalam sikap saling menghargai, menghormati, toleransi antara satu budaya dengan lainnya.

Dalam konteks ini ditegaskan, bahwa perbedaan bukan penghalang untuk mewujudkan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dan Pancasila. Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individu maupun secara budaya.

Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam mendesain kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: “kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak kebudayaan di daerah.” Upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud bila: Pertama, konsep multikulturalisme dipahami oleh bangsa Indonesia dan pedoman hidup. Kedua, adanya pemahaman tentang makna multikulturalisme bagi kehidupan berbangsa. Ketiga, kajian multikulturalisme meliputi berbagai permasalahan, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya prinsip-prinsip etika dan moral. Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan. Karena, multikulturalisme sangat dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup suatu masyarakat yang majemuk.

Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri tetapi membutuhkan konsep lain yang dijadikan sebagai acuan untuk memahami dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Masalah yang dihadapi dengan upaya menuju masyarakat Indonesia yang multikultural dan kompleks.

Dalam kesempatan ini, ada baiknya bila semua melakukan introspeksi mengenai kesiapan tersebut. Pertama, kita mempersiapkan diri melalui berbagai kegiatan diskusi, seminar, atau lokakarya untuk menambah ilmu pengetahuan, dan mempertajam metodologi yang relevan mengenai masyarakat multikultural. Kedua, secara metodologis, berbagai kajian etnografi tradisional pada penelitian mahasiswa untuk skripsi sebaiknya ditinjau kembali untuk diubah sesuai perkembangan antropologi yang ada. Ketiga, ada baiknya para ahli secara bersama-sama melihat, mengembangkan dan menciptakan model penerapan multikulturalisme dalam masyarakat. Sehingga, upaya menuju masyarakat Indonesia yang multikultural itu dapat dengan cepat dan efektif berhasil diwujudkan.

## **BAB 2 Pendidikan Perdamaian: Gagasan dan Konsep Umum**

Manusia merupakan makhluk konfliktris (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Secara sederhana konflik bisa diartikan pertentangan yang ditandai dengan pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan. Pertentangan itu sendiri bisa muncul dalam bentuk pertentangan ide maupun pertentangan fisik. Konflik merupakan kenyataan sosial yang harus dihadapi setiap individu maupun masyarakat. Tidak ada satupun manusia maupun masyarakat yang tidak pernah berkonflik.

Sebuah konflik tidak timbul dari ruang hampa, ia hadir dilatari dari perbedaan, baik itu perbedaan individu, yang dibawa sejak ia lahir, berupa identitas pribadi, atau perbedaan kelompok yang dibangun dengan proses interaksi sosial, atau disebut identitas kelompok. Karena kita terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, profesi, kultur dan agama. Dengan demikian, kemajemukan adalah fenomena yang tidak bisa dihindari Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Wibisono, 2020).

Konflik merupakan proses sosial yang wajar dalam suatu masyarakat, ia akan senantiasa ada sepanjang ada latar yang berbeda dalam masyarakat. Perbedaan itu bisa berupa, identitas, agama, kepentingan, dan lainnya. Sepanjang ada perbedaan dalam masyarakat, potensi konflik akan senantiasa ada. Konflik tidak selamanya negatif, konflik sebagai dinamika masyarakat bisa memperkuat solidaritas grup. Hal ini didasari dari tiga argumen. *Pertama*, konflik akan memperkuat kohesi dan kolektivitas dalam sebuah kelompok yang sedang berkonflik. *Kedua*, dengan adanya situasi konflik, akan lebih memungkinkan adanya asosiasi dan koalisi baru. Dan *ketiga*, terbangunnya keseimbangan kekuatan antar kelompok. Namun jika sebuah konflik tidak termanajemen, sehingga mengarah kepada polarisasi yang mendalam dan dekat dengan kekerasan, konflik bisa berakibat destruktif. Konflik bisa berdampak positif jika terpelihara, terkontrol dan dimanajemen dengan baik, namun bisa berdampak negatif jika konflik mendekatkan pada kekerasan (Rahman, 2021).

Dengan demikian, usaha kita untuk menjauhkan konflik dari kekerasan sangat penting, agar konflik tidak mengarah kepada hal yang destruktif. Pendidikan adalah pencegah konflik dan kekerasan yang terbaik. Dikatakan demikian karena hanya pendidikan yang secara komprehensif memungkinkan perubahan sikap ke arah yang lebih positif, tidak terkecuali sikap merespons konflik dan kekerasan. Peran pendidikan dalam mewujudkan perdamaian sangat penting. Pendidikan merupakan aset berharga bagi pengembangan sumber daya manusia, agar terwujud *civil society* yang kuat. Dengan peran pendidikan yang maksimal, akan terwujud masyarakat dengan kesadaran kritis.

Namun, peran pendidikan perdamaian ini seperti tidak pernah terjadi, padahal lembaga pendidikan juga mempunyai fungsi sosial seperti, membantu memecahkan masalah-masalah sosial, dan mentransmisikan kebudayaan, membentuk manusia dengan jiwa sosial, sebagai alat transformasi kebudayaan. Sudah benar bahwa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijadikan satu, dengan dijadikan satu lembaga diharapkan mampu berintegrasi dan bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan memaksimalkan fungsi ini, secara tidak langsung lembaga pendidikan sudah berperan aktif dalam usaha perdamaian, atau kita bisa menyebutnya sebagai konsep pendidikan perdamaian, yang salah satu langkah adalah memaksimalkan peran lembaga pendidikan.

Jika kita melihat realitas dunia pendidikan, lembaga pendidikan tidak banyak memainkan peran sosial tersebut. Hal ini ditengarai karena beberapa sebab. Pertama pendidikan dan lembaganya tidak proaktif dengan lingkungan sekitar, karena terlalu banyak hal administrasi yang harus dikerjakan. Kedua, tidak ada kebijakan tegas tentang peran dan fungsi lembaga pendidikan terhadap lingkungan dan usaha menjaga kondusifitas lingkungan, sehingga lembaga pendidikan seperti menjadi masyarakat sendiri yang berbeda dengan masyarakat asli. Ketiga, tidak ada orientasi kurikulum pembelajaran yang mengarah menuju perwujudan peserta didik yang berperan aktif dalam menjaga perdamaian, guru, dan tenaga kependidikan, sebagai pihak terkait.

Peran pendidikan dalam penanganan konflik dan usaha perdamaian memang belum terlihat. Hal ini juga dilihat dari bagaimana penanganan konflik seringkali ketika konflik sudah pada level nyata dan hanya bersifat reaktif dengan menerjunkan petugas keamanan. Meski konflik sering terjadi,



model penanganan di Indonesia selama ini tampaknya tidak menunjukkan kecenderungan ke arah yang lebih baik. Upaya-upaya penanggulangan konflik dirasa tidak memadai dan seakan tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya. Solusi atas konflik, cenderung hanya bersifat jangka pendek, dengan menerjunkan aparat keamanan, menangkap provokator maupun pelaku utama di wilayah konflik. Upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini juga lebih menekankan pada pendekatan struktural formal daripada pendekatan kultural (Rosyad et al., 2021).

Dengan situasi yang demikian, diperlukan shifting education paradigms, dari pendidikan yang tidak aktif dalam pembangunan sosial, secara khusus lembaga pendidikan, menjadi lembaga pendidikan yang ikut membangun, mempengaruhi tatanan sosial masyarakat. Dalam pembangunan dan pengembangannya, lembaga pendidikan harus memosisikan diri berada ditengah-tengah masyarakat, sehingga lembaga pendidikan harus menjadi perekat antara dua kutub yang berseberangan. Dengan adanya peran lembaga pendidikan yang seperti ini, diharapkan bisa membangun pendidikan perdamaian yang tidak hanya dalam konsep (*das sein*), namun benar-benar bisa menjadi sebuah hal yang real, dan bisa diterapkan dalam masyarakat (*das sollen*).

#### **A. Pendidikan Perdamaian**

Pendidikan dengan orientasi perdamaian mempunyai peran penting dalam transformasi kebudayaan damai dalam masyarakat. Menurut Tilaar Pendidikan bukan sekedar konsumsi tetapi juga merupakan investasi produktif dalam masyarakat. Pedagogik kontemporer melihat pendidikan bukan sekedar transmisi kebudayaan atau mempersiapkan warga negara untuk masa depan, tetapi terutama sebagai proses penyadaran individu sebagai pendukung dan pembaharu kebudayaan. Tidak ada kebudayaan yang statis, terutama dalam dunia terbuka abad 21. Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan adalah dua sisi dari sebuah mata uang yang sama. Kebudayaan yang semakin dinamis dewasa ini membutuhkan adanya aktor kebudayaan yang kreatif dan produktif. Hal ini bisa tercapai merupakan hasil dari proses pendidikan yang membebaskan. Disisi lain, kebudayaan yang dinamis akan merangsang perkembangan individu yang kreatif. Lekatnya pendidikan dan kebudayaan menjadi sebuah keuntungan besar bagi pendidikan untuk mengkampanyekan perdamaian (Wulandari, 2010).

Galtung memilah perdamaian menjadi dua jenis tipologi berdasarkan struktur sosial, yakni perdamaian positif dan negatif. Pertama, perdamaian negatif merupakan suatu kondisi tidak adanya konflik, tidak terjadi kekerasan, maupun perang akibat dipisahkannya dua pihak yang berkonflik. Kedua perdamaian negatif memerlukan kontrol dan kuasa dari pemerintah untuk melaksanakan perdamaian dan aparat keamanan untuk memisahkan pihak yang berkonflik. Dengan adanya damai negatif pihak yang berkonflik tidak akan bertemu dalam satu ruang atau satu daerah yang sama, usaha perdamaian ini bisa dikatakan sebagai sekularisasi yang dipaksakan untuk meminimalisir ketegangan sampai pada tingkat kekerasan. Perdamaian yang dipaksakan dan masih bersifat semu ini, kemudian kiranya yang membuat Galtung menamainya sebagai perdamaian negatif. Klasifikasi perdamaian negatif adalah pesimistis, kuratif, dan perdamaian tidak selalu dengan cara damai (Galtung, 1996).

Perdamaian positif mengacu pada kedewasaan dan suasana damai dimana terdapat keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Damai positif terjadi akibat interaksi sosial masyarakat terjalin dengan baik, senantiasa ada komunikasi dan kemampuan untuk menerima orang yang berbeda untuk tetap hadir dan dianggap dalam masyarakat. Mewujudkan perdamaian positif memerlukan visi kedepan dan melupakan kenangan konflik lama dan berorientasi membangun masyarakat kembali dalam suasana damai. Integrasi antar komponen masyarakat dan kesadaran akan pentingnya perdamaian menjadi kunci mewujudkan perdamaian positif.

Klasifikasi perdamaian positif adalah integrasi struktural, optimis, preventif, dan perdamaian melalui jalan damai. Dengan perdamaian positif menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya damai, kondisi sosial yang aman guna membangun perekonomian, pemberdayaan, kemajuan tidak akan berkembang tanpa perdamaian. Oleh karenanya, berkaitan dengan perdamaian positif, ada sepuluh nilai-nilai hubungan positif, yakni kehadiran kerjasama, kebebasan dari rasa takut, bebas dari keinginan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tidak adanya eksploitasi, kesetaraan, keadilan, kebebasan bertindak, pluralisme, dinamisme. Pemaknaan perdamaian positif adalah dimulai dari diri sendiri untuk bisa menerima yang berbeda, meminggirkan egoisme demi adanya perdamaian, menerima kebebasan dan

hak asasi manusia untuk hidup dan tidak mengeksploitasi. Perdamaian positif diisi dengan perilaku positif guna menciptakan tatanan sosial yang imparsial.<sup>1</sup>

Dari klasifikasi Galtung kita bisa melihat bahwa, perdamaian tidak selamanya terjadi akibat harmonisasi (perdamaian positif) masyarakat, namun juga bisa karena pemaksaan penguasa (sebagai perdamaian negatif). Dalam proses transformasi masyarakat menuju budaya damai, dan pendewasaannya, agar menciptakan budaya damai positif, memerlukan pendidikan. Unsur pendidikan, dalam mewujudkan budaya damai, disampaikan UNICEF. Badan PBB yang menangani pendidikan ini, mendefinisikan pendidikan perdamaian adalah proses mempromosikan pengetahuan, keahlian-keahlian, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membawa perubahan perilaku yang memungkinkan anak-anak, pemuda dan orang dewasa untuk mencegah (*to prevent*) konflik dan kekerasan; menyelesaikan (*to resolve*) konflik secara damai; dan menciptakan (*to create*) kondisi yang kondusif untuk perdamaian, baik pada level antar personal, interpersonal, antar kelompok, nasional dan internasional. Dari definisi diatas dapat dilihat pendidikan mempunyai peran penting mulai dari pencegahan (*to prevent*), menyelesaikan (*to resolve*), menciptakan (*to create*) kondisi yang kondusif untuk perdamaian, agar sebuah konflik tidak merambat sampai kepada aksi kekerasan.

Karena pendidikan tidak bisa dimaknai hanya sebagai transfer pengetahuan semata. Namun pendidikan sebagai transformasi budaya dan nilai. Pendidikan sebagai transformasi budaya didalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat disebut sebagai kegiatan pewarisan budaya, nilai-nilai luhur dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Pendidikan dan budaya memainkan peranan penting yang didalamnya disatukan akan transformasi

---

<sup>1</sup> Dalam proses rekonsiliasi Galtung menjelaskan tiga proses untuk mencapai perdamaian yakni *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. *Peacekeeping* merupakan usaha intervensi penguasa untuk memisahkan pihak yang berkonflik, dengan menggunakan aparat keamanan, militer guna mencegah pertemuan antar keduanya. Dalam pendekatan ini aparat keamanan bisa menjaga perbatasan, melakukan patroli dan menindas pihak yang melanggar perbatasan atau semacamnya. *Peacemaking* merupakan proses usaha rekonsiliasi melalui pertemuan, komunikasi pada level elit dan pemimpin untuk melakukan mediasi, negosiasi, arbitrase melalui pihak ketiga. *Peacebuilding* merupakan proses akhir yang berlangsung relatif panjang karena didalamnya mencakup beberapa dimensi relasi personal yang berkonflik, kultur dan struktural sosial yang akan dibangun kembali, transformasi nilai, termasuk peningkatan kapasitas lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan aparat keamanan. Johan Galtung, *Peace, war and defense: essays in peace research*; Vol. 2, (Ehlers: Copenhagen, 1976), hlm 282.

nilai, maka tidak akan lengkap jika pendidikan tanpa kebudayaan demikian halnya sebaliknya. Dalam proses transformasi nilai ini terjadi sebuah proses internalisasi. Internalisasi merupakan proses dialektika individu sebagai bagian dari suatu masyarakat, karena individu tidak diciptakan sebagai suatu benda yang pasif dan lembam (diam), sebaliknya ia adalah sebuah peserta aktif yang mempunyai peran, identitas untuk melakukan eksistensi.

Guna menciptakan perdamaian, tidak bisa dipungkiri memerlukan pendidikan akan orientasi menuju perdamaian positif. Untuk mencapai ini diperlukan pemaknaan pendidikan sebagai objek formal keilmuan untuk mentransfer nilai-nilai dan budaya damai. Dalam objek formal, materi keilmuan pendidikan harus mampu mengkampanyekan perdamaian terhadap setiap individu untuk menjadi agen perdamaian. Sedangkan dalam objek material lembaga pendidikan tidak boleh hanya berpusat pada anak didik. Lembaga pendidikan harus berani membangun tatanan sosial yang harmonis dan toleran. Sekolah harus imparial, artinya memberi porsi dan perhatian yang persis sama pada segala bidang, jangan sampai bias atau pilih kasih. Kita sudah menyaksikan bagaimana individu pasti dibentuk kebudayaan. Dalam kasus sekolah, proses serupa juga berlangsung. Dengan demikian dari aspek material dan formal pendidikan akan menjadi sebuah gerakan sosial menuju tatanan sosial yang baru yang mampu mengkampanyekan perdamaian, dan mampu mempengaruhi tatanan sosial.

Pendidikan mempunyai andil dalam menyadarkan masyarakat menuju budaya damai positif. Dalam usaha membangun kesadaran masyarakat terbagi menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, kesadaran magis: kesadaran yang tidak mampu menganalisa hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Sehingga kesadaran pada tingkat ini, masyarakat menjadi terbelakang, tidak mampu berkembang, mereka hanya cenderung menerima apa adanya keadaan, menerima segala hal yang dianggap baik dari tradisi terdahulu, termasuk pewarisan perasaan benci kepada kelompok tertentu. *Kedua*, kesadaran naif kesadaran sudah mampu menganalisis, namun baru dalam lingkup dirinya sendiri belum sampai kepada faktor diluarnya. Kesadaran ini masih bersifat individu, sehingga tidak mampu mempengaruhi keadaan sosial. Maka dalam dalam tingkat ini individu cenderung egois tidak memperdulikan keadaan sekelilingnya. Sehingga masyarakat dalam tingkat ini masih rawan akan konflik. *Ketiga*, kesadaran kritis: kesadaran yang mampu menganalisa antara

satu faktor dengan faktor yang lain, maka seseorang yang sudah sampai pada kesadaran kritis akan mampu memahami kenapa masyarakat miskin dan terbelakang, apa faktor dan bagaimana mengatasinya. Kesadaran kritis ini pada akhirnya yang akan mendekatkan masyarakat akan pentingnya perdamaian dan mewujudkan perdamaian positif.

Menurut Page, pendidikan perdamaian adalah suatu usaha untuk menumbuhkan prinsip dan komitmen, serta usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, nilai, sikap, yang dapat mewujudkan perdamaian, sehingga mereka layak disebut sebagai agen-agen perdamaian. Jadi menurut Page pendidikan perdamaian meliputi transfer *knowledge* untuk menumbuhkan prinsip dan komitmen akan pentingnya perdamaian, tidak hanya sampai disitu, peserta didik harus mampu menjadi agen perdamaian. Jadi pendidikan perdamaian menurut Page adalah usaha transfer, kognitif untuk menyampaikan pesan dan pengetahuan tentang pentingnya perdamaian. Aspek kognitif ini merupakan landasan dasar menuju tingkat selanjutnya yakni afektif. Afektif merupakan perubahan sikap mampu menjaga perdamaian, mengkampanyekan sampai kepada menyikapi sebuah konflik. Aspek terakhir, psikomotor bisa dimaknai ia sudah menjadi agen perdamaian yang mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya yang dahulu bersitegang mampu melakukan mediasi dan mencari jalan tengah untuk *win-win solution* (Bartos & Wehr, 2002).

## **B. Pendidikan Perdamaian dalam Pendidikan Islam**

Dari aspek kebahasaan “Islam” berasal dari bahasa Arab yang memiliki jumlah makna. *Pertama*, Islam merupakan akar kata aslama-yuslimu-islaman, yang berarti tunduk, pasrah, menyerah, ketundukan, atau diri. Hal ini berarti segala sesuatu, baik, sikap, perilaku maupun gaya hidup yang menunjukkan ketundukan terhadap kehendak Allah, adalah Islam, dan hakikat dari diri Allah Swt adalah bersifat mutlak, bulat dan total, yakni dengan menjalankan semua perintah-Nya dan mengendalikan segala larangannya.

Dengan demikian, Islam dalam artian sebagaimana dimaksud di atas adalah islam yang befrlaku pada seluruh alam semesta, yaitu bumi, langit, bulan, bintang, matahari, udara, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.

Kesemuanya tunduk pada kehendak Allah Swt. dengan jalan kepada ketentuan Allah atau sunnatullah (QS. Ar-Ra'd [13]:15).

*Kedua*, kata “Islam” berasal dari kata salim yang artinya selamat. Selamat di sini dapat diartikan selamat di dunia maupun di akhirat. Artinya, Islam merupakan jalan keselamatan bagi manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sebagai tertuang dalam QS. Al-Baqarah [2]: 201. “Dan di antara ada orang yang berdoa: “Ya ada ada orang yang berdoa: “Ya ada Tuhan kami, berilah kami di dunia dan kebaikan di akhirat dan semoga Allah kami dari siksa api neraka.”

Dalam tafsir al-Misbah ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka menyenangkan dunia tetapi bersifat hasanah, bahkan tidak hanya untuk di dunia tapi juga di akhirat. Hal ini juga dalam tafsir al-Maraghi bahwa mereka (yaitu orang-orang yang berdoa) menginginkan kehidupan yang baik yakni dengan cara mencari sebab musabab yang telah dibuktikan oleh pengalaman akan kemanfaatannya dalam hal berusaha dan mengatur tatanan kehidupan, pergaulan dengan masyarakat, mengisi diri dengan akhlak mulia dan memegang teguh syariat agama.

*Ketiga*, kata “Islam” berasal dari kata silmun yang artinya damai. Damai di sini diartikan dalam empat hubungan yang saling terkait, yaitu:

- a) Damai dalam konteks hubungan dengan Allah sebagai Pencipta, yaitu keadaan yang terwujud karena manusia hidup sesuai dengan prinsip penciptaannya yang fitri; seperti pembatasan-Nya dan menjalankan perintah-Nya.
- b) Damai dengan diri sendiri yang lahir jika manusia bebas dari perang batin (split personality); seperti halnya ketika kita dapat mengendalikan nafsu dari berbuat yang salah menjadi berbuat baik dan benar.
- c) Damai dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud jika manusia berada dalam kehidupan yang bebas dari perang dan diskriminasi, serta membumikan prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari.
- d) Damai dengan lingkungan terwujud dari pemanfaatan sumberdaya alam, bukan sebagai penggerak pembangunan tetapi juga sebagai melestarikan hanya sumber kehidupan generasi berikutnya.

*Keempat*, dimensi tersebut merupakan satu totalitas yang bersumber dari keyakinan fundamental bahwa Allah adalah Damai, “Salam”, sumber tujuan

dan sasaran semua aktivitas damai dan menyuruh umat-Nya untuk hidup dalam perdamaian.

Dengan demikian, jika kita menyelami hakikat dari keislaman, maka dengan mudah akan ditemukan bahwa keislaman bisa dimaknai dengan perdamaian. Islam berasal dari kata *aslama-yuslimu-islaman*. Kata tersebut berarti mendamaikan. Maka dari itu, ayat al-Qur'an yang bunyi, *udkhuluu fi al-silm kaffah* bisa diartikan dengan, masuklah kalian dalam satu kesatuan secara total. Sebab kata al-silm berarti kesempurnaan (LSAF, 2021).

Oleh karena itu Islam sendiri dari segi namanya sudah menandakan sebagai agama perdamaian. Paling tidak ada tiga argumen untuk menyatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian. *Pertama*, Tuhan adalah Maha damai. Hal ini menjadi salah satu nama-nama Tuhan yang indah (*al-asma' al-husna*), yaitu Maha damai (*al-salam*). Tuhan telah menciptakan manusia, di antara fungsi adalah menjaga keberlangsungan hidup umat manusia. Karena itu, seluruh praktik ritual keagamaan selalu memiliki visi dan misi untuk mewujudkan perdamaian. Hal ini dapat dilihat dalam ritual shalat. Setiap selesai menunaikan ibadah shalat, umat Islam membaca doa atau wiridan yang berisi tentang harapan untuk hidup damai. Wiridan tersebut berbunyi, Wahai Tuhan, Engkau adalah Mahadamai. Dari-Mu muncullah kedamaian. Dan kepada-Mu akan kembali. Maka hidupkanlah kami dengan dan masukkanlah kami ke dalam surga, rumah kedua. *Kedua*, perdamaian merupakan keteladanan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. Di saat memulai dakwahnya, ia menjadikan perdamaian sebagai salah satu titik penting dalam melakukan perubahan sosial. Rasulullah Saw sadar betul, bila dakwahnya dimulai dengan jalan kekerasan, maka sejak awal akan mendapatkan perlawanan yang keras.

Secara sosiologis dapat dipastikan bahwa orang-orang Arab yang hidup di padang pasir, yang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan hidup dengan jalan kekerasan menjadi tantangan tersendiri bagi Nabi Muhammad Saw. Atas dasar itulah, pilihan terbaik yang harus diambil adalah dakwah dengan jalan damai.

Ketiga, perdamaian merupakan salah satu bentuk peradaban manusia. Menurut Ibnu Khaldun, setiap manusia harus menjalin hubungan yang harmonis dengan yang lain. Manusia pada hakikatnya adalah kehidupan yang

terus melakukan interaksi sosial. Jika hal itu dilakukan, maka sesungguhnya bangsa tersebut telah membangun yang adiluhung. Sebaliknya, jika aspek itu tidak dijalankan dengan baik, maka akan terjadi litigasi yang dapat mengarah pada pedas kerusakan. Karena itu, perdamaian sebenarnya merupakan inti dari agama dan relasi sosial. Menolak perdamaian merupakan sikap yang bisa ditolak sebagai esensi dari agama dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, dalam sejarah awal kemunculan pendidikan Islam yang bertalian dengan kemunculan Islam masa awal, Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam memberikan pengajaran kepada para sahabat untuk menghormati pemeluk agama lain. Hal ini terlihat ketika Rasulullah Saw tiba di Kota Madinah dan resmi menjadi pemimpin kota. Babak baru sejarah Islam dimulai. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad memiliki kedudukan, bukan hanya sebagai kepala agama, melainkan pula sebagai kepala Negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi Muhammad terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi.

Untuk memperkuat masyarakat dan Negara, Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Dasar pertama membangun masjid, selain sebagai tempat shalat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum Muslimin dan mempertalikan jiwa mereka, di samping sebagai tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Masjid pada masa Nabi bahkan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Rasul Muhammad mempersaudarakan antara golongan-golongan yang hijrah dari Makkah ke Madinah dan penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan turut membantu kaum Muhajirin. Dengan begitu, kaum Muslim merasa dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan. Apa yang dilakukan Nabi, telah menciptakan menciptakan bentuk persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama.

Selain itu, Nabi Muhammad juga membangun persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Di Madinah, selain orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Untuk menjaga Yahudi agar masyarakat agar terwujud, Nabi Muhammad memiliki perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama bersama orang-orang. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam politik dan



keagamaan. Dari situ, bisa terlihat bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad di masa awal pertumbuhannya berasaskan penjunjungan tinggi pada nilai-nilai perdamaian.

Dengan demikian, pendidikan Islam di masa awal telah berada dalam perjuangan dan usaha untuk mencapai perdamaian. Sesuai dengan misi universal Islam itu sendiri, yakni sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam.

Namun demikian, konflik dan perang bukan dominasi dunia Islam. Di Negara-negara Barat (Eropa, Amerika, Afrika), bahkan benua Asia juga tidak luput dari konflik dan perang. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya pendidikan perdamaian yang merupakan studi tentang penyebab perang dan perang. Pencegahannya. Pada tahap berikutnya berkembang menjadi studi tentang kekerasan dalam segala bentuk dan mendidik untuk melawan sistem perang agar tercipta sistem perdamaian; system perdamaian baik di tingkat individu dan struktural. Pendidikan perdamaian menggunakan cara pembelajaran yang progresif, egaliter, penyelidikan terbuka, dan partisipasi aktif peserta didik.

Para pengkaji *peace education* masa awal, seperti Comenius, Jane Addmas, Maria Montessori, John Dewey, Paulo Freire, Johan Galtung, Brigit Brocke-Utne, Betty Reardon, Ian M. Harris, dan tokoh-tokoh lain, semuanya mendukung kekuatan pendidikan sebagai transformasi sarana peserta didik, terlebih masyarakat. Mereka menggunakan cara menciptakan kesadaran, memberikan pemahaman hubungan antara kekerasan langsung, tidak langsung dan struktural, pendidik berusaha menciptakan kesadaran baru untuk masa depan yang lebih damai.

### **Tujuan pendidikan perdamaian dalam pendidikan Islam**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa *peace education* merupakan konsep yang masih terus dikembangkan dan dikembangkan. Meskipun demikian, kajian tentang perdamaian dan yterus menjadi obyek dari suatu pencarian tanpa henti di hampir semua komunitas dan kelompok, terlebih dalam banyak pelatihan, kesemuanya baru pada tarap isu-isu *peacebuilding*. Kehadiran konflik dan kekerasan perang dalam sejarah manusia selalu mengharuskan bahwa yang harus menjadi prioritas utama

adalah lembaga pendidikan, sebagai pengelolaan konflik dan perlawanan terhadap bentuk kekejaman dari peperangan (Al-Mubarak, 2017).

Dalam beberapa dekade terakhir pendidikan perdamaian memperoleh momentum dan secara bertahap diterima sebagai bagian penting dan diperlukan masyarakat agar terbentuk tatanan kehidupan yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi perdamaian. Aktivitas *peace education* saat ini dapat menjadi salah satu kategori empati. Pertama, pendidikan perdamaian sebagai bentuk transformasi pola pikir; kedua, *peace education* sebagai pemberdayaan seperangkat keterampilan; ketiga, pendidikan perdamaian sebagai promosi dan bentuk penjunjangan tinggi terhadap hak asasi manusia, terutama di Negara-negara yang rentan akan konflik dan peperangan; dan keempat, pendidikan perdamaian sebagai pembentukan budaya perdamaian dan sebagai advokasi budaya perdamaian di masyarakat.

Keragaman pendekatan dalam pendidikan menunjukkan bahwa ada keinginan luas dari para pemerhati dan pegiat perdamaian untuk berkontribusi secara persepektif individu guna konsep pendekatan yang tengah berkembang sehingga sangat sulit mencapai kesepakatan yang utuh mengenai sifat damai dan penciptaan perdamaian itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka yang jelas untuk kerangka teori perdamaian yang akan mempertemukan tujuan yang berbeda, tetapi tujuan yang saling terkait dan konsep-konsep yang ada menyediakan kerangka kerja yang dibutuhkan untuk program pendidikan perdamaian yang komprehensif dan efektif. Akan tetapi, meski tidak ada universalisasi yang disepakati tentang pendekatan yang utuh untuk mencapai perdamaian bukan berarti malah menjadi hambatan akan tercapainya perdamaian yang seutuhnya.

Mengapa demikian? Sebab, pada dasarnya berbeda, tujuan dari pendidikan perdamaian akan membantu peserta didik mencapai pemikiran bahwa perdamaian adalah jalan kehidupan dan budaya universal yang memiliki kontribusi untuk mengembangkan landasan kerja sama dengan masyarakat dan budaya yang. Dalam hal ini, pendidikan menjadi dasar pembentukan budaya perdamaian pada peserta didik. Dengan demikian, pendidikan perdamaian memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana kekerasan dan kemudian diberikan pengetahuan baru tentang isu-isu kritis sebagai jalan alternatif, dengan cara menjaga perdamaian,

menciptakan perdamaian, dan membangun perdamaian. Dalam implementasinya, praktik *peace building* dewasa ini mencerminkan definisi umum mengenai perdamaian yang sudah diadopsi oleh United Nation (UN) sejak tahun 1990-an. Pada tahun 1992, Sekretaris Jendral UN, Boutros-Boutros Ghali, telah merilis dokumen yang berjudul *An Agenda for Peace*. Ghalimenyarankan bahwa pembangunan perdamaian adalah satu bentuk pencegahan konflik melalui rekontruksi sosial dan politik.

Tujuan pendidikan perdamaian tersebut sesuai dan relevan dengan tujuan pendidikan Islam, di mana tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah mengembangkan fitrah peserta didik, baik ruh, fisik, kemauan, dan akal nya secara dinamis akan terbentuk pribadi Muslim sejati yang mengabdikan dan mewujudkan segala perintah Allah yang diatur dalam syariat Islam.

Dalam hal ini, pendidikan Islam menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara makhluk-makhluk lainnya dan tanggung jawab dalam kehidupan ini, hubungan sebagai makhluk sosial dan tanggung jawab dalam tatanan kehidupan masyarakat, hubungan dengan alam dan untuk memahami hikmah yang tercipta dengan cara menjaganya. alam. Pendidikan Islam kepada dua dimensi dialektika, yakni dimensi vertikal dan horizontal. Pendidikan Islam menjadi jembatan untuk memahami fenomena dan misteri kehidupan serta upayanya mencapai hubungan dengan Tuhan. Sedangkan dalam dimensi horizontal, pendidikan Islam diharapkan mampu mengembangkan pemahaman peserta didik dalam menghadapi kehidupan nyata, baik yang menyangkut diri, masyarakat yang kerap disebut dengan *hablum min an-nas*, maupun dengan semesta alam. Artinya, peserta didik tidak hanya berorientasi kepada keridhaan Sang Khalik semata, tetapi juga bermakna bagi sesama manusia dan lingkungan kehidupan di sekitarnya.

Oleh karena itu, konsep damai dalam pandangan Islam dapat dibagi menjadi empat bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Pertama, damai dalam konteks hubungan dengan Allah sebagai Pencipta, yakni mewujudkan yang terwujud karena manusia hidup sesuai dengan prinsip penciptaannya yang fitri. Kedua, damai dengan diri sendiri. Ketiga, damai dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat diwujudkan jika manusia berada dalam kehidupan yang bebas dari perang dan diskriminasi, serta

menerapkannya prinsip keadilan. Keempat, damai dengan lingkungan, terwujud dari pemanfaatan sumber daya alam bukan hanya sebagai penggerak pembangunan, melainkan pula sumber yang harus melestarikan demi kesinambungan ekosistem kehidupan. Dengan demikian, terlihat bahwa tujuan pendidikan Islam yang diambil dari nilai-nilai Islam dapat menciptakan harmonisasi yang berdasarkan perdamaian di antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lainnya dan alam sekitar. Begitu pun pendidikan perdamaian memiliki tujuan menciptakan manusia yang harmonis, damai, dan berkeadaban (Baedowi, 2010).

Berdasarkan pemaparan di atas jelas bahwa tujuan pendidikan perdamaian dalam pendidikan Islam sejalan dengan ajaran Islam yang hidup selaras dengan keseimbangan kehidupan baik di dunia maupun untuk akhirat. Keseimbangan kehidupan di dunia diwujudkan dengan mewujudkan tatanan kehidupan yang damai dengan diskriminasi, kekerasan dan juga konflik yang mengarah pada peperangan.

## **BAB 3 Model Pendidikan Perdamaian dalam Lintas Sejarah Indonesia**

### **A. Nilai Pendidikan Pesantren untuk Perdamaian**

Pesantren, yang notabene adalah pusat atau ujung tombak dalam melahirkan ilmu-ilmu keislaman sekaligus juga mampu melahirkan peradaban Islam yang inklusif. Peradaban yang mampu menjangkau seluruh aspek keagamaan maupun aspek kebangsaan dalam Islam maupun pemeluknya, bahkan pemeluk agama lain. Pesantren beserta seluruh aspeknya, jika dapat dikelola dan dikembangkan dengan benar tak pelak akan menghadirkan nuansa baru dalam peradaban Islam, bahkan dapat menjadi pusat dari peradaban tersebut. Sesungguhnya tradisi pendidikan baik dari strategi dan tujuan pendidikan Pesantren dapat mempengaruhi tradisi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Sebagai contohnya adalah adanya suatu masyarakat yang dalam kehidupan beragamanya belum sepenuhnya sepenuhnya menjalani syariat, namun setelah berdiri sebuah pesantren, orang-orang berdatangan untuk belajar agama, mencari rejeki, bahkan ada yang mendirikan rumah. Hal ini berarti pesantren yang memiliki tradisi yang khas telah yang mempengaruhi tradisi masyarakat sekitarnya (P. K. Musfah, 2011).

Pengaruh lain juga tampak dalam cara berpakaian dan perilaku masyarakat. Masyarakat, sekitar pesantren, cenderung berpakaian layaknya santri seperti sarungan, berbaju takwa, songkok, alat musik hadrah, bersalaman dan mencium tangan kiai dan lain-lain. Boleh jadi, masyarakat yang ada di sekitar pesantren sebenarnya sudah mengenal tradisi Islam sebelumnya, namun mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkannya setelah adanya pesantren di lingkungan mereka. Hal ini membuktikan bahwa ada kontribusi besar yang diberikan oleh tradisi pesantren dalam membentuk kepribadian masyarakat Islam, di mana hal ini tentu akan berimbas pula dalam pembentukan peradaban muslim di Indonesia (Fitri, 2012).

Hal ini membuktikan bahwa ada kontribusi besar yang diberikan oleh tradisi pesantren dalam membentuk kepribadian masyarakat Islam, di mana hal ini tentu akan berimbas pula dalam pembentukan peradaban muslim di Indonesia. yang memiliki sejarah panjang dalam sejarah Indonesia ikut memberi andil dalam pembentukan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu

pesantren telah diakui sebagai lembaga yang sangat berjasa bagi umat Islam. Terbukti, lembaga-lembaga pesantren telah berhasil mengislamkan hampir 90% penduduk Indonesia dan mempertahankannya hingga sekarang hingga Indonesia menjadi bangsa Muslim yang paling besar jumlahnya (Darmadi, 2009).

Berbicara tentang Nilai Pendidikan pesantren ada sembilan alasan dan dasar mengapa pesantren layak disebut sebagai laboratorium perdamaian. *Pertama*; Kesadaran harmoni beragama dan berbangsa. Perlawanan kultural di masa penjajahan, perebutan kemerdekaan, pembentukan dasar negara, tercetusnya Resolusi Jihad 1945, hingga melawan pemberontakan PKI misalnya, tidak lepas dari peran kalangan pesantren. *Kedua*; Metode mengaji dan mengkaji. Selain mendapatkan bimbingan, teladan dan transfer ilmu langsung dari kiai, di pesantren juga diterapkan kajian yang bersumber dari berbagai kitab, bahkan sampai kajian lintas mazhab. *Ketiga*; Para santri biasa diajarkan untuk khidmah (pengabdian). Ini merupakan ruh dan prinsip loyalitas santri yang dibingkai dalam paradigma etika agama dan realitas kebutuhan sosial. *Keempat*; Pendidikan kemandirian, kerja sama dan saling membantu di kalangan santri. Lantaran jauh dari keluarga, santri terbiasa hidup mandiri, memupuk solidaritas dan gotong-royong sesama para pejuang ilmu. *Kelima*; Gerakan komunitas seperti seni dan sastra tumbuh subur di pesantren. Seni dan sastra sangat berpengaruh pada perilaku seseorang, sebab dapat mengekspresikan pesan-pesan keindahan, harmoni, dan perdamaian. *Keenam* adalah Lahirnya beragam kelompok diskusi dalam skala kecil maupun besar untuk membahas hal-hal sepele sampai yang serius (Koesoema, 2015).

Dialog kelompok membentuk santri berkarakter terbuka terhadap hal-hal berbeda dan baru. *Ketujuh*, Merawat khazanah kearifan lokal. Relasi agama dan tradisi begitu kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren menjadi ruang yang kondusif untuk menjaga lokalitas di tengah arus yang semakin pragmatis dan materialistis. *Kedelapan*; Prinsip Maslahat (kepentingan umum) merupakan pegangan yang sudah tidak bisa ditawar lagi oleh kalangan pesantren. Tidak ada ceritanya orang-orang pesantren meresahkan dan menyesatkan masyarakat. Hanya kalangan yang membina masyarakat kebanyakan adalah jebolan pesantren, baik itu tentang moral maupun intelektual. *Kesembilan*; Penanaman rohani. Tidak hanya tentang

hukum Islam (fikih) yang dialami, banyak pesantren juga melatih para santrinya untuk tazkiyatunnafs, yaitu proses perawatan hati (Kesuma et al., 2011).

## **B. Pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur**

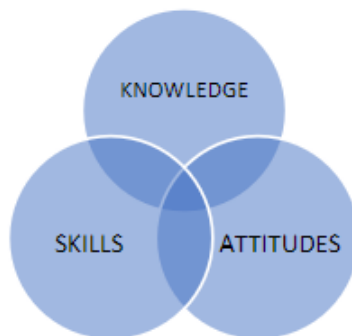
Melalui gagasannya Gus Dur memaparkan bahwa Islam dirasa kurang memberikan pengaruh kepada peserta didik, padahal sejatinya pendidikan Islam bukan hanya sebagai materi yang dipelajari dan dipelajari oleh peserta didik di lembaga pendidikan formal. Lebih dari itu pendidikan Islam harus memperkenalkan ajaran Islam yang berhubungan dengan kehidupan di masyarakat. Sehingga peserta didik mampu mengimplementasikan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat. Nampaknya, pendidikan Islam juga diharapkan mampu menjadi media bagi peserta didik dalam memberikan solusi alternatif sebagai jawaban atas konflik sosial dan kekerasan yang ada di lingkungan sekitarnya, karena dinamika kehidupan bermasyarakat dengan aspek sosial budayanya yang kental. Seperti saat ini teknologi membuat manusia asing dengan dunia nyata, paling sibuk dengan dunia maya atau dunia maya. Pola komunikasi yang sudah kurang memperhatikan etika berkomunikasi. Bahkan saling menghujat di media sosial.

Hal inilah yang diawatirkan oleh Gus Dur, ketika masyarakat sudah tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan lagi. Padahal sejatinya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dengan menjaga hubungan baik dengan Allah secara vertikal maupun dengan sesama manusia dan alam secara horizontal. Sebagaimana misi Islam sebagai rahmatan lil alamin pendidikan Islam selayaknya dapat bekerja sebagai sarana atau media pembawa energi positif untuk membentuk kehidupan manusia yang damai. Pengertian dalam Islam itu sendiri adalah damai. Apa lagi jika kita melihat banyaknya tindakan mengejar dalam pendidikan baik yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik, maupun sebaliknya. Membuat resah masyarakat tentang konsep pendidikan yang seharusnya dikembangkan saat ini dengan melihat budaya masyarakat yang bebas terkendali (Abdullah, 2016).

Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi pendidikan Islam yang dapat meminimalkan ketersediaan kekerasan dalam pendidikan, yaitu pendidikan

perdamaian. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya tujuan dari pendidikan perdamaian adalah membantu peserta didik dalam merumuskan gagasan bahwa perdamaian merupakan jalan kehidupan yang berkontribusi terhadap landasan untuk melihat perbedaan budaya dimasyarakat. Dengan pendidikan perdamaian peserta didik akan terbiasa dengan perbedaan, sehingga mampu menjalankan kehidupan dengan harmonis, mewujudkan kehidupan yang damai dan tidak melakukan diskriminasi, kekerasan dan juga konflik yang mengarah pada peperangan.

Melalui pendekatan sosio-kultural Gus Dur mencoba merumuskan pendidikan perdamaian di lembaga non formal seperti pengajian dan *majelis ta'lim*, koloman atau yasinan dan sebagainya. Selain itu Gus Dur juga mengembangkan pendidikan perdamaian melalui kebijakan-kebijakan tentang pendidikan perdamaian yang dikembangkan di lembaga-lembaga formal, baik di pesantren, sekolah dan madrasah. dibutuhkan agar peserta didik dapat menghindari konflik dan kekerasan di lingkungannya, kemudian dianggap tidak aman agar kondisi yang damai, serta menciptakan suasana yang kondusif secara intra-personal, antar-pribadi, antarkelompok di tingkat nasional maupun internasional. Diagram berikut dapat membantu memberikan gambaran hubungan antara pengetahuan, keterampilan dan pendidikan perdamaian dalam proses pembelajaran.



**Gambar.** Hubungan antara pengetahuan, keterampilan dan pendidikan perdamaian (Sumber: Siradj, dkk., 1974).

Pengalaman belajar dalam pendidikan perdamaian dalam diagram tersebut yang mencakup tiga domain yaitu: pertama, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Aspek pengetahuan meliputi; pemahaman, kesadaran diri dan pengenalan tentang (budaya, ras, gender dan agama, konflik dan pertempuran,



keadilan dan kekuasaan, hak asasi manusia damai dan suasana tanpa), keduaketerampilan meliputi kemampuan dalam berkomunikasi, kerjasama, empati, imajinasi, sabar dll, ketiga, sikap yang berkaitan dengan kemampuan dalam menghormati orang lain, memiliki sifat toleran, tanggung jawab dll) (Wahid, 2006).

Irisan dari penguasaan pengetahuan, dan sikap akan menghasilkan peserta didik yang dapat menghindari terjadinya konflik (*peace-keeping*), penguasaan pengetahuan dan keterampilan akan menghasilkan peserta didik yang mampu menciptakan konflik yang terjadi secara damai (*peace-making*), dan jika ketiga komponen itu dapat dikuasai maka peserta didik bisa menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi upaya terjadinya perdamaian di lingkungan sekitarnya.

Gus Dur berpendapat bahwa pendidikan seyogyanya harus memberikan perasaan aman dan sejahtera ketika berhubungan dengan sesamanya. Dalam konteks pembelajaran pendidikan perdamaian dapat diberikan kepada peserta didik melalui pengetahuan seperti pemahaman tentang bagaimana penyebab terjadinya kekerasan, kemudian diberikan pengetahuan tentang isu-isu kritis sebagai solusi alternatif. Selain itu bisa menggunakan pendekatan sosial-politik, dengan cara pendidikan perdamaian dijadikan sebagai kurikulum tersembunyi, yang merupakan target dan pesan tersembunyi yang ada dibalik interaksi belajar mengajar di sekolah, artinya pendidikan perdamaian dapat dimasukkan dalam berbagai mata pelajaran sehingga peserta didik memiliki komitmen untuk mencintai sesama dan menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan masalahnya. Hal itulah yang menjadi dampak pengiring dalam kurikulum yang ditegaskan sasaran pembelajaran secara formal. Sebagaimana pendidikan karakter dalam pembelajaran yang menjadi inti dari pendidikan Islam.

Sebagaimana disampaikan Gus Dur dalam pemikiran pendidikannya bahwa dalam kurikulum sangat memperhatikan kebutuhan peserta didik, terutama dalam mengembangkan dirinya sebagai individu yang akan berproses menuju kedewasaan berfikir, berkarya dan sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga tidak akan berarti apa-apa jika sebuah kurikulum dikembangkan tanpa melihat atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana pendidikan itu berlangsung. Nampaknya Gus Dur memandang peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi dalam dirinya, sehingga

kurikulum dan lingkungan yang kondusif dalam pendidikan memiliki peran dalam mengarahkan potensi tersebut ke arah positif.

Melalui konsep pendidikan perdamaian di sekolah peserta didik akan terbiasa berdialog dan bereksplorasi dalam memahami strategi dalam menghadapi masalah hidup serta dapat menyelesaikan konflik dan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan, baik konflik dengan diri sendiri, dengan orang lain, maupun antar komunitas. Dengan kemampuan mempercayai, negosiasi dan membangun yang ada dalam dirinya akan membantu perkembangan potensinya menuju kedewasaan yang optimal. Pemahaman tentang konteks budaya, sosial ekonomi masyarakat menjadi penting sekali untuk dijangkau oleh para pendidik, agar bisa memilih strategi, metode dan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan lingkungan peserta didik. Sebagai fasilitator, guru juga untuk mengayomi dan memberi perhatian penuh kepada peserta didik agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan, dialogis yang edukatif bagi pengalaman belajar siswa. perlu bagi guru untuk menghargai pentingnya semangat perdamaian, menanamkan sikap bertanggung jawab baik secara individu maupun tanggung jawab sosial bagi peserta didik. Hal itu juga dapat direpresentasikan dengan tidak memberikan peluang kepada peserta didik untuk melakukan tindakan atau mendapatkan tindakan kekerasan baik fisik, maupun non fisik disekitarnya.

Jika dilihat dari pemikirannya, aliran pendidikan Gus Dur termasuk dalam aliran eksistensialisme, yang melihat manusia memiliki potensi dan dapat memainkan peran dalam kehidupan sehingga ia bisa bahagia dan mulia. Sebagaimana Ivan Illich juga termasuk dalam Existentialism's concept of freedom in education". Adapun perbedaan pemikiran Gus Dur dengan Ivan Illich adalah dalam konsep pendidikannya Ivan Illich berdasarkan konsep pendidikan barat yang cenderung rasional dan liberal. Sedangkan Gus Dur merupakan seorang yang Religius, Theistik sehingga konsep pendidikannya berdasarkan ajaran Islam yang merupakan nilai-nilai moral dan budaya. Lebih dari itu keduanya sama-sama aliran humanistik yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap teori dan praktik pendidikannya. Hal itu bisa dilihat dari konsep pendidikan perdamaian yang dikembangkan oleh Gus Dur lebih mengacu pada pendidikan humanis yaitu melalui pendekatan sosio-kultural dan pendekatan sosial-politik.

Jika ditinjau dari perspektif psikologi belajar maka pendidikan perdamaian akan berkorelasi positif dengan pengembangan diri secara pribadi dan bermasyarakat, sehingga nilai-nilai toleransi, saling menghargai, menghormati, dan melihat konflik sebagai hal yang positif, akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang baik tersebut akan terbentuk dalam diri seseorang yang terbiasa dan secara kontinyu melaksanakannya. Menurut teori behavioristik Edwin R Guthrie yang salah satunya adalah kontiguitas, bahwa dengan pembiasaan menghargai orang lain, menghargai orang lain, dan toleransi dengan sesamanya akan membuat seseorang dikenal dengan baik. Namun sebaliknya, jika tidak biasanya memiliki rasa toleransi, menghormati dan menghargai orang lain, maka akan sulit untuk menerima perbedaan dan kerentanan konflik baik pada perkuliahan maupun kekerasan baik fisik maupun psikis.

Pendidikan Perdamaian Gus Dur berpijak pada filsafat pendidikan eksistensialisme yang manusia memiliki potensi dan dapat memainkan peran dalam kehidupan sehingga ia bisa bahagia dan mulia. Melalui pendidikan perdamaian peserta didik diberikan pemahaman melalui transfer pengetahuan mengenai penyebab kekerasan, tentang isu-isu aktual, kemudian ditanamkan sikap seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, dan toleransi. Selain itu perlu agar bisa (*skill*) dalam mengatasi masalah-masalah yang rentan konflik dan dianggap tidak konflik.

## **BAB 4 Kurikulum dalam Pendidikan Perdamaian**

Telaah atas keragaman konsep kurikulum yang damai dengan perdamaian yang cukup penting. Sebagaimana diketahui, menurut Alkin (1992), pada mulanya kurikulum hanya dipahami sebagai bahan ajar yang dibuat sekolah. Sementara itu, Ralph Tyler, istilah 'pengalaman' (*experience*) daripada 'materi' (*content*) (Stanley, 2009), yang mengatakan bahwa apa yang diajarkan, sekadar materi yang sudah disiapkan dalam bahan belajar dan buku teks, tetapi juga pengalaman-pengalaman nyata yang dialami peserta didik, guru dan orang lain yang dijadikan sebagai sumber belajar (konstruktivistik). Dalam dekade terakhir ini, perspektif yang lebih komprehensif tentang kurikulum hadir, antara lain dalam kajian Pollard et al. (2014). Menurut mereka, pemahaman tentang kurikulum saat ini perlu merujuk pada kurikulum dalam Keragaman dimensi, yang meliputi apa yang direncanakan secara formal (direncanakan), apa yang diaktualisasikan dalam proses pembelajaran (diamati), apa yang diujikan (dinilai), apa yang dapat dikuasai oleh siswa (dipelajari) serta apa yang tersembunyi (*hidden*). Kelima dimensi ini bisa saja koheren namun tidak bisa pula saling mendukung. Dampak dari cakupan luas sumber ini adalah bahwa interaksi di atas sumber belajar dengan rekayasa sistem dan budaya sekolah sebagai arena penyediaan hidup damai menjadi semakin terbuka. Kekuatannya adalah bahwa pembinaan hidup damai muncul dari berbagai lini sekolah dan, pada saat yang sama, kelemahannya adalah bahwa proses hidup damai memerlukan energi ekstra dari keseluruhan sistem pendidikan.

### **A. Kurikulum Resmi (*Planned*)**

Sejauh ini, kurikulum resmi dapat disiapkan dan direncanakan oleh Pemerintah, lembaga resmi yang ditunjuk, atau pihak sekolah. Secara teoretik, Kelly (2009) memetakan model Schon yang membagi tiga model pengembangan kurikulum yakni center-periphery, proliferasi centres dan shifting centres. Model pertama menjelaskan bahwa kurikulum disusun oleh pemerintah; model kedua mengarahkan kurikulum agar disusun oleh lembaga di bawah pemerintah yang langsung berinteraksi dengan sekolah dan mengembangkan prinsip-prinsip dasar pendidikan yang dicanangkan pemerintah; sedangkan model ketiga menempatkan sekolah sebagai pusat perencanaan dan pengembangan kurikulum. Mode 1 mencerminkan pola

instruksi (atas ke bawah), model 2 Mencerminkan desentralisasi dan model 3 anggota kuat dasar otonomi sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum (demokratisasi kurikulum).

Bila hal ini berlaku dengan pendidikan arus perdana maka semua lini manajemen pendidikan tersebut dapat berperan dalam memperkuat visi dan misi hidup lembaga pendidikan. Prioritas pembangunan karakter peserta didik telah digulirkan dalam kurikulum di Indonesia. Kurikulum 2013 yang saat ini berlaku merinci Standar Kompetensi Lulusan (SKL) ke dalam Kompetensi Inti (KI) untuk setiap jenjang yaitu: KI-1 tentang sikap spiritual, KI-2 tentang sikap sosial, KI-3 tentang pengetahuan dan KI-4 keterampilan. Adapun sikap yang ditonjolkan di antaranya adalah cintadamai, kasih sayang, menghargai orang lain, kerjasama (Permendikbud No. 64 Tahun 2013). Ini sejalan dengan 18 karakter siswa yang dikembangkan oleh Pemerintah yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif/bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Adisusilo, 2013).

Selain kebijakan di atas, para pegiat Living Values Education (LVE) memopulerkan 12 nilai yang meliputi: penghargaan, kasih sayang, toleransi, kejujuran, kerendahan hati, kerjasama, kebahagiaan, tanggung jawab, kesederhanaan, kebebasan dan persatuan. Shofan, 2015). Dengan demikian, secara teoretis, kurikulum resmi, baik yang digulirkan oleh pemerintah maupun komunitas sudah sarat dengan karakter damaidan nilai-nilai pro-sosial lainnya. Namun demikian, ruang lingkup kurikulum resmi bukan berarti tanpa kritik. Kajian tim CRCS menyimpulkan bahwa muatan pendidikan agama dalam Kurikulum 2013 memang telah memuat sistematisasi 4 kompetensi secara lengkap. Namun, dengan orientasi pendidikan agama yang diajarkan hanya mengajarkan konten satu agama tanpa pengenalan terhadap sudut pandang agama yang berbeda, kecenderungan ini dapat memperkuat potensi fanatisme sempit dan anti terhadap Keragaman budaya dan agama.

Namun demikian, pandangan lain dapat dikemukakan bahwa, meskipun orientasi pendidikan agama di Indonesia itu mono-religionsesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Pasal 13, siswa Muslim, Kristiani dan yang beragama lain di jenjang SMP/MTs misalnya,

diajari dan dididid dengan hidup yang toleran dan berintegritas di tengah masyarakat yang tentu saja, ditinjau dari sudut pandang agama mereka sendiri. Sebenarnya, sudut pandang mono-agama di Indonesia atau Malaysia di satu sisi; atau multi-agamasebagaimana diterapkan di Eropa di sisi lain, bukanlah penentu apakah siswa akan terbiasa dengan nilai-nilai hidup damai. Ini karena yang diperlukan adalah pedagogi atau sistem interaksi di kelas dan yang positif terhadap persamaan dan Keragaman hidup (Nurwanto & Cusack, 2017). Dilihat dari aspek materi, sebagaimana dalam konseptualisasi Galtung, pendidikan perdamaian tidak hanya mengajarkan 'perdamaian negatif' yang dibebankan negasi terhadap bullying, kekerasan, atau cerita yang menarik tetapi juga 'perdamaian positif' yang bergantung pada keberlanjutan kondisi masyarakat yang selalu mendukung dan proaktif mendukung distribusi keadilan (Bajaj & Hantzopoulos, 2016).

Kehidupan harmoni ini perlu dibangun dari kehidupan sekolah dan kelas secara nyata dengan menempatkan siswa dan guru sebagai subjek yang kritis dan terlibat dalam menciptakan hidup damai. Sementara itu, De Rivera (2009) menunjukkan bahwa ruang lingkup pendidikan perdamaian meliputi: pertama, penerapan dan ketaatan terhadap norma sosial yang terdiri dari kerjasama dan penyesuaian keseimbangan—konflik, toleransi dalam keragaman sosial, penanganan secara adil serta pencapaian terhadap peran wanita. Kedua, dukungan struktur negara dan peran politik untuk memperkuat partisipasi publik, komunikasi dan akuntabilitas, serta jaminan HAM. Ketiga, membantu pemulihan lingkungan, baik fisik sosial yang meliputi keamanan sosial dan pembangunan berkelanjutan, yang menempatkan prinsip-prinsip harmoni dengan lingkungan sebagai prioritas. Pendek kata, pendidikan perdamaian mencakup berbagai elemen yang mereduksi konflik dan kekerasan (perdamaian negatif), serta memperkuat kemanusiaan dan martabat manusia). Elemen yang terakhir ini (*positive peace*) oleh Fox (2014) diyakini sebagai perdamaian yang sesungguhnya.

## **1. Kurikulum yang Dipraktekkan (*Observed*)**

Kurikulum yang tertuang sebagaimana tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan (terutama standar isi), silabus, rencana mengajar, buku ajar dan bahan ajar merupakan satu hal. Ini tidak akan menggambarkan apapun tentang

apa dan bagaimana proses interaksi pembelajaran itu berlangsung. Oleh karena itu, kurikulum yang dilaksanakan di kelas atau sekolah merupakan pembuktian (berbasis bukti) tentang aktivitas dan khusus bagaimana nilai-nilai toleransi dan penerapan itu diajarkan. perdamaian yang dipraktekkan di kelas merupakan situasi nyata tentang interaksi siswa, guru, sumber belajar dan lingkungan yang menyertainya untuk mendukung pengetahuan, sikap dan keterampilan hidup damai. Dilihat dari aspek pedagogik atau proses interaksi pembelajarannya, transformasi hidup memerlukan tiga kriteria, yaitu konsistensi, dan koherensi (Nicholson, 2016).

Sesuai dengan ruang lingkup pembelajaran damai sebagaimana disajikan oleh Galtung dalam Bajaj and Hantzopoulos (2016) dan De Rivera (2009), target untuk mengurangi pengetahuan, sikap dan perilaku intoleran dan pro-kekerasan di satu sisi dan tumbuhnya kebiasaan kerja sama hidup di sisi lain yang perlu di dalam teknik dan strategi pembelajarannya. Target bahwa siswa dapat menghargai perbedaan pendapat dengan teman di kelasnya, sebagai contoh, semestinya konsisten dengan teknik belajar siswa melalui presentasi dan diskusi kelompok. Sebagai sebuah teknik mengajar, presentasi atau diskusi dapat dilakukan dan dapat dilakukan oleh siswa apabila dibiasakan. Namun demikian, teknik ini perlu dilakukan lebih strategis, yakni dengan mempertimbangkan waktu, tempat dan kondisi untuk menghasilkan hasil (hasil) yang diharapkan.

Konsistensi berbagai teknik mengajar untuk menghasilkan hasil misalnya berupa kemampuan menghargai perbedaan sosial (strategi) yang dimulai di ruang kelas pada akhirnya terakumulasi membentuk metode pembelajaran guru. Keseluruhan metode pembelajaran yang teruji dan objektif ini selanjutnya membentuk teori belajar, yang dikonstruksi melalui penelitian ilmiah. Jika frekuensi diskusi dilakukan terus-menerus, maka proses pedagogik tersebut memenuhi kriteria konsistensi. Namun demikian, menurut Nicholson (2016), teknik dan strategi itu harus kompatibel dengan hasil yang diharapkan. Lebih dari itu, konsistensi dan yang tinggi merupakan prasyarat ketercapaian prinsip koherensi dari keseluruhan proses dan interaksi pembelajaran di kelas dan sistem nilai yang dibangun di sekolah.

Dalam lingkup praktis ini, siswa dapat diarahkan untuk mengalami hingga menguasai keterampilan hidup damai secara nyata. Jatuh menjabarkan keterampilan empati yang diperlukan, yakni: afirmasi, komunikasi, kerjasama

dan resolusi konflik (Hicks, 1988). Metode pembelajaran diharapkan dapat membangkitkan kemampuan berfikir kritis yang tersedia pada kemampuan mendukung sikap respek terhadap sesama serta kemampuan mengutarakan pendapat secara jelas. Tidak hanya itu, pengawasan juga ditekankan, misalnya melalui pembelajaran kooperatif di mana siswa merasa bahwa keberhasilan mereka tidak akan tercapai tanpa dan bantuan orang lain sehingga mereka terdorong untuk saling berbagi informasi dan masalah (Son, 2019).

Konsistensi penerapan pembelajaran kooperatif dan pemanfaatannya dengan hasil pembelajaran juga perlu dimonitor. Pada level yang paling penting adalah kemampuan siswa untuk mengutarakan masalah seperti konflik, kemampuan mendengar pihak-pihak yang terlibat konflik, membangun solusi bersama melalui dialog (Guilherme, 2017) dengan pihak-pihak yang terlibat konflik dan diakhiri dengan rekayasa sosial untuk bertenggang rasa. Keterampilan-keterampilan tersebut perlu dibiasakan dalam proses kelas dan sekolah secara luas. Secara praktis, sistem antara dalam pembelajaran di Indonesia yang menjadi bimbingan dan asuhan yang bersifat kekeluargaan dan alam antara guru dan siswa (Wangid, 2009), dapat model perkuat sistem hidup bersama di sekolah (Djiwandono, 2000).

Berkaitan dengan proses komunikasi antarpihak, kemampuan yang diperlukan bukan hanya berbicara namun juga kemampuan mendengar dengan empatik. Keterampilan mendengar ini merupakan bagian dari hubungan timbal balik dalam proses memahami, bernegosiasi dan menemukan solusi. Dengan sangat jelas, Jacobson (2010) menyatakan:

*'That kind of deep listening requires a reciprocity in moral education; not only students listening to teachers, but teachers listening to students. Moral education means taking seriously those we educate, living in reciprocal relationships with them. And, again, relationship always requires deep listening ... listening to their 'I like', responding freshly to what they are taking seriously and learning to recognize when we are being bullshitted and when we're not'.*

## **2. Kurikulum yang Diujikan (Assessed)**

Evaluasi dimaksudkan untuk melihat apakah masih ada gap (kesenjangan) antara apa yang diharapkan dan apa yang telah dicapai siswa, atau sebagaimana Tyler utarakan, berkaitan dengan 'sampai pada kondisi seperti apa level ketercapaian itu' (Stanley, 2009). Dalam



pendidikan liberal, pendidikan dibuat terstandar dan terstruktur, di mana target dibuat secara ketat. Siswa-siswa yang tidak mampu 'berkompetisi' maka dengan sendirinya akan tersingkir. Oleh karena itu, sistem evaluasi dibuat serba-kompetitif, hitam-putih dan homogen. Dalam menilai taraf pengetahuan siswa tentang makna penting bekerja sama dengan orang lain misalnya, materi dalam buku teks sebaiknya, hanya satu-satunya ukuran dan jawaban. Begitu juga ucapan (ucapan) yang dicatat oleh jawaban tunggal dari pertanyaan. Hal yang paling relevan adalah siswa yang diberi kebebasan untuk mengutarakan pikiran dan pengalamannya, bahkan bisa saja dari pergaulan dengan tetangganya tentang kebutuhan komunikasi. Penjelasan dalam bentuk esai tertulis atau ekspresi yang terbuka merupakan jawaban 'autentik' tentang bagaimana kehidupan sehari-hari itu dikonstruksi oleh siswa

Di samping itu, sesuai dengan standar penilaian Kurikulum 2013, ada tiga ranah hasil pembelajaran yang perlu secara simultan, yaitu: pengetahuan, keterampilan dan sikap (Permendikbud No. 16 Tahun 2016). Ketiga ranah ini dapat diuji secara kategorikal namun pada dasarnya tidak terpisah antara satu dengan yang lain. Interaksi ketiga ranah tersebut juga kerap kali mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan tertentu yang lebih tinggi. Misalnya, peduli atau menjaga lingkungan, baik lingkungan manusia, binatang atau habitat lainnya, tidak cukup hanya pada tingkat pengetahuan, berupa kemampuan menjelaskan berbagai habitat yang perlu dilindungi dan di tingkat sikap seperti ketidaksetujuan terhadap penebangan hutan secara liar. Capaian yang lebih tinggi sebenarnya adalah dalam wujud perilaku (keterampilan) untuk mengubah perilaku yang merugikan yang merugikan lingkungan seperti menembak satwa dan, selanjutnya, terlibat untuk, melakukan penghijauan dan perlindungan hewan yang patut dilindungi. Dengan demikian, perilaku atau *skills* peduli lingkungan adalah tujuan tertinggi sedangkan target lainnya (pengetahuan dan sikap) merupakan 'capaian antara' (*intermediary attainment*) yang dapat membantu dalam waktu dan tempat yang fleksibel. Respons dan tindakan yang dinamis siswa dalam membangun kehidupan yang harmonis merupakan objek telaah dalam pendidikan perdamaian, bukan jawaban dalam suatu pertanyaan atau tes dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, asesmen pendidikan perdamaian lebih mengutamakan proses yang dinamis, bukan hasil berdasarkan normatif (Saptono, 2011).

### **3. Kurikulum yang dikuasai (*Learned*)**

Asesmen pada akhirnya menyatakan bahwa siswa telah menunjukkan kemampuan tertentu. Namun demikian, ada satu dimensi penting lainnya bahwa apa yang dikuasai siswa sebenarnya bukan dari sekedar apa yang diujikan. Apa yang diujikan oleh sekolah untuk menentukan ‘kualitas’ siswa dapat saja sebuah ‘representasi’ kemampuan baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Namun, di sisi lain, ini dapat merupakan ‘penyederhanaan’ atau penyederhanaan dari kemampuan siswa yang kompleks yang tidak dapat dinilai dari suatu sistem evaluasi tertentu. Oleh karena itu, asesmen, sebuah finalisasi dari penilaian, tetapi ini hanya mencerminkan penilaian yang bersifat relatif.

Sebagaimana jamaknya faktor sosial, apa yang diketahui dan dialami oleh siswa tidak hanya berasal dari kelas dan dari apa yang diajarkan oleh gurudan ditargetkan oleh kurikulum resmi. Siswa juga menyerap informasi dari orang tua, media massa baik maupun elektronik, komunitas dan media sosial seperti sekarang ini. Apa yang dirasakan dan dirasakan oleh siswa tentang interaksi sosial, baik konflik, kekerasan dan ketegangan emosi di satu sisi, maupun harmoni dan ketenangan hidup di sisi lain yang perlu dijumpai, misalnya melalui kampanye perdamaian dan anti-intimidasi, penulisan esai tentang kepedulian sosial, perdamaian lintas kelompok, dan berbagai kegiatan ekstra atau sosial lainnya yang mengondisikan siswa untuk menyampaikan gagasan inovatif dan kritis. Atas dasar aktivitas ini, 'apa yang mungkin dikuasai' siswa dapat terekspos dan bahkan menjadi sumber belajar bagi siswa-siswa lain.

#### **4. Kurikulum Tersembunyi (Hidden)**

Kurikulum yang direncanakan adalah bagian dari ‘dunia yang diketahui’ sedangkan pendidikan itu sendiri meliputi juga elemen-elemen yang tidak terjangkau atau tersembunyi (*hidden*). Makna dan nilai yang melimpah (makna luar biasa) dari proses pendidikan sebenarnya karena ada yang tidak disadari, baik oleh guru maupun siswa, tetapi ide atau nilai itu mempengaruhi dan membentuk sistem berfikir dan emosi. Darder (2017) Mengungkapkan tersembunyi sebagai nilai-nilai sekolah dan cara pandang guru yang secara dominan mempengaruhi sistem belajar—termasuk di dalamnya pengetahuan—dan interaksi di sekolah. Sistem nilai tersebut dapat bersumber dari pemahaman dan penghayatan budaya, kebiasaan dan kepercayaan yang dianut, sebagaimana dijelaskan Galtung (1990) dalam Standish (2015).

Sistem nilai yang telah menyatu (*embedded*) kehidupan seseorang, baik kekerasan damai, akhirnya membentuk cara pandang dan perilaku sehari-hari. Sistem keyakinan dan perilaku ini sedikit atau banyak dalam ungkapan dan respons guru terhadap siswa; siswa terhadap guru; dan siswa terhadap siswa lainnya. Sebagaimana ditekankan Standish (2015), sistem nilai yang bersifat simbolik juga mempengaruhi aspek struktur seperti aturan-aturan maupun kultur berupa kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Dalam teknis pembelajaran, teknik dan strategi yang dipilih oleh guru juga memuat nilai atau *soft skills* yang beragam. Sebagai contoh, diskusi secara implisit menciptakan kebiasaan mengungkapkan pendapat, mendengar pendapat orang lain, dan menghargai perbedaan. Keterampilan ini terbentuk tanpa disadari oleh subjek belajar. Oleh karena itu, *hidden curriculum* mencakup aspek yang luas, terentang dari yang abstrak (*intangible*) seperti keyakinan/ideologi hingga yang konkret (*tangible*) berupa ekspresi dan perilaku. Mendasarkan pada konsep kurikulum tersembunyi di atas, pendidikan hidup damai tidak dapat berjalan secara komprehensif bila tidak menyentuh sistem keyakinan dan kebiasaan sehari-hari di sekolah (Mulyana, 2004).

Kemampuan melakukan respons dan umpan balik yang spesifik, menjelaskan dan ramah dari seorang guru, kebiasaan berjabat tangan dan senyum sebelum berpisah, menyatakan maaf jika merepotkan orang lain dan mengungkapkan rasa terima kasih bila diberi kemudahan—untuk menyebut beberapa perilaku positif—dapat menjadi elemen harian yang tanpa sengaja—karena sudah refleksi—dapat menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis dalam kehidupan sosial sekolah. Seorang aktivis perdamaian, Irfan Amalee, pendiri Peace Generation Indonesia, membuat ilustrasi sederhana. Ia menulis bahwa bila hendak menilai apakah sekolah itu ramah anak atau mendeteksi apakah sekolah itu nyata atau tidak; cukup dengan menyaksikan respons pertama yang dirasakan ketika bertemu staf di pintu gerbang sekolah. Pernyataan ini terkesan simplistik namun sebenarnya pesannya adalah bahwa nilai dominan apa yang ada di sekolah itu dapat dilihat dari kebiasaan harian yang sederhana dan nyata (*dailyreal life*). Oleh karena itu, konstruksi aturan dan pelaksanaan kurikulum formal tidak akan berkembang bila sistem nilai, baik yang nyata maupun tersembunyi tidak hidup menjadi sikap dan perilaku antara pihak yang terlibat dalam dunia sekolah.

## **B. Kurikulum Pendidikan Perdamaian dalam Pendidikan Islam**

Salah satu fondasi utama dalam proses pengembangan pendidikan perdamaian untuk meningkatkan perdamaian di kalangan peserta didik adalah lembaga pendidikan. Kurikulum perdamaian pendidikan menjadi pelengkap dalam proses pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik, baik di sekolah, maupun di luar sekolah. Sekolah atau kampus boleh mengembangkan program pendidikan sesuai yang dibutuhkan ke dalam kurikulum atas kesepakatan bersama artinya dengan pengembangan kurikulum pendidikan perdamaian. Terkait dengan pelaksanaan kurikulum pendidikan perdamaian, ia dapat diterapkan dalam sekolah maupun di luar sekolah atau kampus yang lazim disebut dengan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan hidden kurikuler.

Penyusunan kurikulum *peace education* memiliki tujuan, antara lain, pertama, untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perbaikan sistem pendidikan; kedua, untuk membangun kapasitas perdamaian. Sedangkan pengembangan kurikulum tersebut akan mencakup berbagai tema seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Pelaksanaannya bisa di dalam ruang kelas atau intrakurikuler, bisa pula di luar kelas atau ekstrakurikuler. Dengan demikian, implementasi kurikulum *peace education* sangat fleksible dan dinamis yang adaptif dengan kondisi lingkungan lembaga pendidikan berada.

Dalam buku *Politik, Bahasa, dan Budaya: Pandangan Kritis pada Reformasi Sekolah*, Joseph Check (2004) mengajukan pertanyaan tentang muatan kurikulum dalam sebuah sistem pendidikan. "Dapatkah sistem pendidikan sebuah negara melalui program kurikulumnya menghindari pertanyaan tentang isu RAS, bahasa, dan budaya, serta dapat mencapai pencapaian prestasi yang diharapkan?" Pertanyaan yang sangat serius itu mengundang kita untuk menjawab, bahwa tidak mungkin rasanya kita menghindari isu-isu tersebut sejauh permasalahan pemerataan (*equity*) pendidikan masih tinggi, akses (akses) dan kualitas (kualitas) pendidikan masih rendah. Artinya, masalah konflik, bahkan di tingkat sekolah, sangat mudah terjadi. Untuk mengatasi masalah-persoalan yang kerap menimbulkan konflik di tingkat sekolah, manajemen sekolah sebaiknya mempertimbangkan untuk memasukkan agenda Keragaman budaya dan etnik ke dalam kurikulum menurut Ronal Ferguson (2002), respons dan pendekatan budaya sangat besar

pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa, terutama menyangkut sikap dan perilaku dalam memandang perbedaan (Zaqiah & Rusdiana, 2014).

Kurikulum dalam pendidikan Islam menjadi landasan yang digunakan untuk mengarahkan peserta didik ke arah pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi jumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum pendidikan Islam mengacu pada konseptualisasi manusia paripurna sebagai khalifah dan pengabdian Allah. Dalam kurikulum pendidikan Islam, tidak hanya memosisikan peserta didik sebagai objek didik, melainkan juga sebagai subjek didik yang sedang mengembangkan diri menuju kedewasaan sesuai dengan konsepsi Islam. Oleh karena itu, kurikulum tersebut tidak akan bermakna apa pun bila tidak dilaksanakan dalam situasi dan kondisi di mana tercipta suatu interaksi edukatif yang timbal balik antara pendidikan di satu sisi dengan peserta didik di sisi lain. Kurikulum *peace education* menempatkan pendidik dan peserta didik dalam posisi setara, sehingga memungkinkan terlaksanakannya proses pembelajaran yang dinamis dan egaliter.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kurikulum pendidikan Islam selalu memberikan ruang bagi peserta didik untuk menggali potensi dirinya dan mengembangkannya melalui berbagai kegiatan pendidikan. Pendidik dan seluruh komponen pendidikan lainnya termasuk kurikulum merupakan media atau sarana yang menciptakan situasi dan kondisi yang memanusiakan manusia, yang memungkinkan terjadinya proses pengembangan kebebasan berpikir peserta didik. Bahkan, dalam hal ini, Allah Swt menandakan agar tidak ada paksaan kepada seseorang untuk masuk ke dalam Islam, sebagaimana tertuang dalam ayat berikut.

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”. (QS. Al-Baqarah [2]: 256).

Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan kurikulum pendidikan perdamaian dapat dikembangkan sesuai dengan atau di dalam kurikulum pendidikan Islam, yang sangat mementingkan eksistensi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dari proses itulah diharapkan akan tumbuh para peserta didik (generasi muda) yang religius sekaligus toleran yang selalu semangat perdamaian.

Sementara itu, terkait dengan materi, pendidikan perdamaian diformulasikan untuk menjadikan peserta didik menyadari dan memahami konsekuensi dan akar konflik tertentu dan alternatif apa yang mungkin dapat dilakukan. Selanjutnya melalui refleksi, diskusi dan penggunaan teknik pengambilan persepektif, mereka menunjukkan berbagai persepektif dan membayangkan diri berada di tempat-tempat yang terjadi konflik, untuk menumbuhkan empati bagi korban kekerasan. Tahap berikutnya, pendidikan perdamaian memunculkan alternatif jalan keluar pada pikiran peserta didik. Peserta didik untuk menemukan konflik resolusi dan ditransformasikan melalui cara-cara nir-kekerasan.

Selain itu, muatan budaya dan etnik dalam kurikulum juga penting untuk dimasukkan untuk meminimalisasi pemahaman siswa tentang monopoli makna kebenaran secara sepihak. Selain itu, muatan keragaman budaya dan etnik dalam kurikulum pendidikan juga untuk mengubah dan menambah respons pedagogis guru dalam mengajar. Jika guru memiliki budaya dan etnik yang kuat, respon pedagogis guru akan meningkat dengan sendirinya. Pendekatan pendekatan kurikulum berbasis budaya, respon pedagogis para guru terhadap siswa juga akan berbeda. Hal tersebut dengan sendirinya akan membantu siswa dalam mengaksentuasi Keragaman budaya di lingkungan mereka masing-masing.

Geneva Gay dalam *Culturally Responsive Teaching* (2000), sebagaimana dinukil Ahmad Baidhowi,<sup>39</sup> memberikan sedikitnya lima argumen mengapa muatan budaya dan etnik itu sangat strategis dan penting untuk ditubuhkan dalam kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan damai dan resolusi konflik. Pertama, muatan budaya dan etnik dalam kurikulum pendidikan sangat krusial sekaligus esensial bagi perbaikan aspek pedagogis dosen dalam mengajar. Kedua, karena sebagian besar sumber belajar di ruang kelas adalah buku teks, memasukkan agenda budaya dan etnik ke dalam buku pelajaran merupakan keniscayaan karena hal itu akan mengubah gaya mengajar guru.

Ketiga, berdasarkan penelitian secara simultan di beberapa lembaga pendidikan, muatan budaya dan etnik dalam kurikulum pendidikan memiliki arti yang banyak bagi siswa sekaligus meningkatkan apresiasi siswa dalam belajar. Keempat, relevansi muatan budaya dan etnik dalam kurikulum juga melestarikan sejarah, budaya, dan tradisi sebuah etnis tertentu sehingga pada

akhirnya dapat meningkatkan apresiasi kebangsaan yang tinggi. Kelima, muatan budaya dan etnik yang diambil dari berbagai sumber yang kaya, bukan hanya dari buku tetapi juga dari pengalaman orang perorangan, baik melalui wawancara maupun yang dilakukan dalam bentuk tayangan dan sebagainya. Artinya, sumber informasi yang sangat melimpah tentang budaya dan etnis di luar sekolah itu akan baik guru maupun siswa dalam menciptakan cinta untuk mendukung keragaman pola kehidupan.

Dengan demikian, proses pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan perdamaian adalah holistik dan mencoba meliputi tiga ranah dalam diri peserta didik, yakni dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebuah langkah yang meliputi pengenalan pengetahuan baru yang relevan, memberikan rangsangan agar bertanya, menghargai, menggunakan diskusi, dan metode partisipatif lainnya untuk menumbuhkan kepedulian serta mendorong tindakan dalam dimensi pribadi dan sosial. Sosial di sini dapat diterjemahkan sebagai langkah peserta didik untuk melibatkan atau menginisiasi keterlibatan masyarakat di sekitarnya untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan perdamaian. Hal ini sebagaimana sebagaimana dicanangkan oleh Komisi Pendidikan untuk Perdamaian PBB (Peace Education Standing Commission) telah mengidentifikasi adanya 3 wilayah penting yang melibatkan masyarakat secara luas dalam Pendidikan Perdamaian. Wilayah Ketiga tersebut adalah:

- 1) Pendidikan keagamaan (*Religious education*) dan pendidikan antar keagamaan (*Inter-religious education*).
- 2) Pendidikan masyarakat yang bebas dari kekerasan (*violence*) serta konflik.
- 3) Pendidikan lingkungan dan pendidikan untuk pengembangan sosial-ekonomi.

Mengajarkan perdamaian akan memberi pemahaman kepada peserta didik untuk jangka panjang dan memberi manfaat praktis. Harapan selanjutnya para peserta didik dapat membuat pemikiran kritis yang mendorong adanya perubahan pribadi dan struktur sosial yang diperlukan. Selain itu, juga dapat mengubah banyak masalah yang berhubungan dengan kekerasan ke alternatif tanpa kekerasan menuju perdamaian abadi. Ini penting dilakukan, karena terjadinya kekerasan dalam perang berdampak buruk terhadap generasi yang terhitung, serta kerugian materi dan lingkungan. Hal ini juga menyebabkan

rantai rantai mengejar ketertinggalan di beberapa aspek kehidupan, melahirkan fenomena seperti banyak kejadian dan seks, serta gangguan atau kejahatan genosida.

“Genosida” merupakan istilah yang baru dikenal setelah tahun 1944. Istilah ini sangat spesifik yang merujuk pada kejahatan kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat dengan tujuan untuk membasmi keberadaan kelompok itu. Hak asasi manusia, sebagaimana dalam deklarasi Hak-Hak (*Bill of Rights*) AS atau Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Universal PBB 1948, adalah terkait dengan hak-hak individu melihat berbagai peristiwa tersebut kehadirannya pendidikan menjadi penting. Keberadaan perdamaian pendidikan dapat mengubah pola masyarakat berkaitan dengan keniscayaan perang dan memungkinkan orang untuk melihat alternatif untuk sebuah tatanan masyarakat yang didasarkan pada mewujudkan. Sebuah cita-cita yang dimiliki oleh penduduk dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun tidak mudah untuk melaksanakannya, namun tetap harus ada yang memulai yang selanjutnya secara bertahap dilaksanakan secara terus menerus.

Untuk mencapai hasil yang baik dan materi dapat dengan mudah dan dapat dijangkau oleh peserta didik, metode pengajaran damai education harus dilakukan dengan cara holistik-partisipatif dengan tidak membatasi diri pada parameter konsep yang kaku. Pengajaran perdamaian pendidikan haruslah dengan menerapkan fleksibilitas dan penggunaan pendekatan yang dinamis. Hal tersebut diterapkan agar dapat mengelaborasi tiga ranah peserta didik; kognitif, afektif, dan psikomotorik sekaligus.

### **C. Pengajaran Pendidikan Perdamaian dalam Pendidikan Islam**

Dalam pembelajaran pendidikan perdamaian, paling tidak harus melingkupi tiga hal. *Pertama*, membangun kesadaran akan realita pembangunan dan konsekuensi dari kekerasan, dan kesadaran akan terciptanya perdamaian. *Kedua*, bangunan yang menjadi perhatian dan pengembangan nilai-nilai tanggung jawab, empati, kasih sayang, harapan, dan sosial. Mengembangkan pilihan moral yang berpunca pada kapasitas pembangunan peserta didik untuk peduli terhadap sesama. *Ketiga*, mengubah pola pikir dan sikap pribadi, dan melakukan sesuatu yang konkret tentang situasi kekerasan.



Agar proses pembelajaran pendidikan perdamaian tersebut, dalam konteks sekolah atau lembaga pendidikan, paling tidak ada dua model pendekatan pendidikan damai dan resolusi konflik yang bisa ditubuhkan ke dalam budaya sekolah. Workshop program pertamamelalui yang sengaja dibuat pada tahun ajaran baru dalam rangka pengenalan dan orientasi sekolah. Nilai-nilai damai dan jenis-jenis resolusi konflik yang disampaikan melalui workshopbiasanya sarat dengan kegiatan yang menggembirakan melalui sebuah proses bermain, berkemah, diskusi tentang Keragaman, dan menonton film-film yang berkaitan dengan penciptaan budaya sekolah yang sehat dan kreatif. Pendekatan dengan model workshopakan memudahkan guru dan fasilitator untuk menciptakan pemahaman dan keterampilan menangani konflik sekaligus menciptakan rasa damai di lingkungan sekolah. Hasil akhir dari pendekatan ini juga sangat mungkin untuk diadaptasi ke dalam sebuah bentuk kurikulum formal dan menjadi semacam kode etik siswa dan guru yang dibuat dan disepakati bersama (Muthoifin, 2018).

Setelah mempertahankan kode etik siswa dan guru secara tertulis dalam bentuk undang-undang, sekolah kemudian bisa mempertahankannya dengan melakukan model implementasi berikutnya, yaitu pengintegrasian materi-materi tentang pendidikan damai dan resolusi konflik ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah. Pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan mengelola konflik dalam kurikulum merupakan elemen yang sangat penting dalam manajemen konflik berbasis sekolah (MKBS).

Selanjutnya, pendekatan pengajaran yang holistic-partisipatif memungkinkan peserta didik untuk bertanya, dan berkolaborasi. Peserta didik terlibat dalam dialog dengan guru atau dengan rekan pelajar lain. Praktik mengartikulasikan dan menunjukkan keragaman pola pikir merupakan latihan penting dalam perspektif yang luas. Pembelajaran perdamaian yang holistik-partisipatif berarti pula memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bekerja sama dalam belajar, bukan bersaing satu sama lain. Pembelajaran ini, selain meningkatkan motivasi belajar, juga meningkatkan hubungan antara peserta didik; menghilangkan sikap individualism, perasaan, dan perasaan buruk akibat buruk. Dengan demikian, antara peserta didik antara satu dengan yang lain tidak terasing dan pilihan (Nurjunaedah, 2014).

Dengan demikian, pada tahapan selanjutnya, dari pembelajaran pendidikan perdamaian yang holistik-partisipatif akan mendukung proses

pendidikan yang humanis. Pendidikan yang manusiawi adalah pertumbuhan sosial, pribadi, dan afektif peserta didik, yang mana individu dari setiap didik diterima apa adanya. Guru juga harus selalu mendorong agar setiap peserta didik agar menghormati satu sama lain, mendukung terhadap keragaman di dalam kelas. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam ayat al-Nahl ayat 90.

“Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi tujuan agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. Al-Nahl [16]: 90).”

Dari ayat tersebut jelas sekali bahwa Islam menyuruh umatnya agar berlaku adil, berbuat kebajikan, dan melarang perbuatan keji, kemungkaran melawan permusuhan. Maka, bagi seorang guru di sekolah, menjadi suatu keharusan untuk menanamkan nilai yang dapat mendamaikan. Dari situlah pembelajaran kemudian membantu peserta didik untuk mengembangkan benih-benih cinta dan kasih sayang yang dibutuhkan dalam membangun masyarakat yang damai tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan.

Keadaan pula dengan pengajaran pendidikan Islam, tidak ada satu cara pembelajaran yang sempurna dan paling ideal untuk semua tujuan pendidikan, semua ilmu dan materi pembelajaran, semua tahap dan perkembangan, semua tingkat pengembangan dan kecerdasan, semua guru dan pendidik, dan semua nuansa yang meliputi proses pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, dapat menghindari bahwa seorang guru tidak melakukan penggambaran terhadap lebih dari satu cara dalam proses pembelajaran. Hal ini agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan, khususnya pendidikan damai.

#### **D. Strategi Implementasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Perdamaian dalam Pendidikan Islam**

Hingga saat ini konsep *peace-education* masih menjadi wilayah diskursus kontemporer yang belum menemukan kesepakatan utuh mengenai pemaknaan sifat damai dan penciptaan konsep dari perdamaian itu sendiri. Secara teknis hal tersebut diperlukan untuk membentuk kerangka kerja terstruktur dalam setiap program *peace-education* yang komprehensif dan efektif, sehingga dapat mempertemukan tujuan-tujuan *peace-education* yang

berbeda pada setiap kultur pendidikan di berbagai tempat. Akan tetapi meski belum ada universalisasi yang disepakati terkait pendekatan yang digunakan dalam menentukan standar program peaceeducation, dapat dipahami bahwa ide besar dari konsepsi *peace-education* bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai pemikiran bahwa perdamaian adalah jalan kehidupan dan kultur universal yang memiliki kontribusi untuk mengembangkan landasan kerja sama dengan masyarakat dan budaya yang berbeda.

Pada konteks ini, pendidikan menjadi dasar pembentukan kultur perdamaian dalam diri peserta didik. Sehingga *peace-education* memberikan pemahaman utuh kepada peserta didik mengenai bagaimana akar dari kekerasan untuk kemudian diberikan pengetahuan baru tentang isu kritis sebagai solusi alternatif, yakni dengan cara menjaga perdamaian (*peace keeping*), menciptakan perdamaian (*peace making*), dan membangun perdamaian (*peace building*). Abdurrahman Assegaf yang meneliti tentang pendidikan tanpa kekerasan, menyatakan bahwa model peaceeducation selain memiliki materi dan metode juga memiliki metode instruksional yang dapat diaplikasikan untuk semua jenjang pendidikan. Ia menjelaskan maksud dari model instruksional adalah sebagai acuan bagi proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Untuk menerapkannya Abdurrahman Assegaf menambahkan bahwa diperlukan pengolahan kelas, melakukan interaksi belajar-mengajar, penyampaian materi dan metode, yang semuanya menerapkan pendekatan humanistik (*human approach*) di mana antara pendidik dan peserta didik terdapat komunikasi multi-arah sehingga tercipta suasana demokratis di dalam kelas (Nurliani, 2016).

Dalam pendekatan ini, peran guru tidak mendominasi secara berlebihan. Pelaksanaan model tersebut memerlukan persiapan fasilitas sederhana, seperti ruang belajar yang fleksibel dan suasana yang kondusif. Banyak metode yang bisa digunakan dalam praktikpraktik peace-education di sekolah. Misalnya melalui kurikulum yang diajarkan secara resmi, kegiatan ekstrakurikuler, aktifitas seni budaya dan dialog-dialog yang bertemakan perdamaian. Sasaran utama dari setiap aktifitas yang dijalankan adalah siswa, selain komunitas sekolah secara umum, yaitu guru, kepala sekolah atau komite sekolah. Praktik peace-education tersebut perlu mendapat perhatian khusus di dunia pendidikan Islam sehingga visi perdamaian yang sudah melekat dalam ajaran Islam dapat direpresentasikan dengan utuh melalui kegiatan pembelajaran.

Realitanya visi tentang peace-education belum sepenuhnya dipahami atau dijiwai oleh para pendidik dan penanggungjawab kurikulum. Sebagian besar pendidik hanya berupaya menyampaikan pesan perdamaian itu sebagai bagian dari pencapaian materi atau ketuntasan belajar, namun belum membangunnnya dalam konsep budaya dan paradigma. Oleh karena itu diperlukan beberapa strategi untuk mengkondisikan peace building secara massif, yakni sebagai berikut:

1. Merancang kurikulum pembelajaran tematik yang terintegrasi. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran kontekstual yang didasarkan pada hasil penelitian John Dewey (1916) yang menyebutkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dan dengan kegiatan atau peristiwa yang akan terjadi di sekelilingnya. Pembelajaran ini menekankan pada daya pikir yang tinggi, transfer ilmu pengetahuan, mengumpulkan, dan menganalisis data, memecahkan masalah-masalah tertentu baik secara individu maupun kelompok. Dalam konteks ini, tentunya peserta didik dapat dihadapkan langsung pada realitas masyarakat yang ada di sekitar mereka untuk kemudian merancang solusi berbasis peace-education dengan melibatkan berbagai bidang keilmuan yang dipelajari di sekolah.
2. Mengupayakan pola komunikasi nirkekerasan dalam lingkup pendidikan formal. Komunikasi nirkekerasan dapat terbangun melalui penggunaan kata-kata yang positif pada setiap interaksi yang terjadi di lingkungan pendidikan, seperti pembiasaan kata-kata terimakasih, tolong, dan lain sebagainya di sekolah.
3. Menciptakan pendidikan yang demokratis. Pendidikan yang demokratis berarti melibatkan peserta didik secara aktif dalam segala aktivitas di lembaga pendidikan. Hal ini akan mampu menciptakan komunikasi yang baik antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pendidikan dengan tetap mengupayakan monitoring atau pengawasan terhadap segala aktivitas pendidikan yang terjadi di sekolah.
4. Mendorong literasi peace-education di kalangan pendidik agama Islam. Pendidik harus dibekali pengetahuan yang luas dan mendalam terkait isu kontemporer dalam teori maupun praktik peace-education serta pengkajiannya dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. Sehingga pendidik dapat merepresentasikan konsep peace-education dalam setiap

kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas secara komprehensif.

## **Bab 5 Kiat Sekolah Wujudkan Pendidikan Perdamaian**

### **A. Peranan guru sebagai transformasi sosial menuju budaya damai**

Sebuah lembaga pendidikan, harus mampu menciptakan agen-agen perdamaian. Dalam hal ini, guru memainkan peran yang sentral, karena ia merupakan *role model*, penyampai materi dan orang yang mampu mengevaluasi peserta didik, agar mampu mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan selalu bersifat antisipatif, yaitu mempersiapkan peserta didik, agar mampu melaksanakan peran dan tugas hidup di masa depan. Dengan memperhatikan zaman yang selalu berubah, tantangan masa depan, dan peran guru sebagai pencetak agen perdamaian, diperlukan interpretasi dan reinterpretasi tugas dan visi guru.

Dalam metode pembelajaran peran guru sangatlah penting. Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang amat strategis. Karena sedemikian pentingnya, hingga di antara pakar pendidikan ada yang berpendapat: “Andaikata tidak ada kurikulum secara tertulis, tidak ada ruang kelas dan prasarana belajar mengajar lainnya, namun masih ada guru, maka pendidikan masih tetap berjalan”. Guru dalam komponen pendidikan bisa memainkan peran penting tidak hanya dalam lingkup dunia pendidikan. Namun juga sebagai penggerak perubahan sosial (*agent of social change*) ke arah yang lebih baik, serta membangun peradaban secara seimbang yakni fisik, intelektual, sosial, seni, moral dan spiritual. Guru sebagai profesi yang memainkan peran begitu penting ini, tidak ayal mampu mempengaruhi pola pandang masyarakat sampai pada tingkah laku, etika masyarakat. Karena guru memainkan peran pendidik yang mentransformasikan pengetahuan, nilai, etika sejak dini sampai kepada seseorang remaja sampai dewasa (Muthoifin, 2016).

Peranan guru untuk menyiapkan regenerasi individu yang siap terjun ke masyarakat sangat penting. Jika guru mampu menyampaikan pengetahuan, nilai yang baik kepada siswa yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor dengan baik, output pendidikan yang dihasilkan akan membentuk individu yang baik yang beretika, mampu bergaul, bersosialisasi, dan bisa berperan aktif dalam memajukan masyarakat. Dari sini terlihat, peran guru yang begitu sentral dalam pembangunan individu. Dalam aspek pendidikan perdamaian

akan ditekankan dalam dalam ketiga ranah ini, kognitif, afektif, psikomotor. Sehubungan orientasi peran guru, dalam pembangunan masyarakat dan pendidikan perdamaian begitu penting, maka seorang guru harus memiliki visi dan misi sesuai dengan Al-Qur'an. Yakni *Ulul Albab*, *al-Ulama*, *al-Muzakki*, *ahl al-Dzikir* dan *Rasikhuna fi al-'ilm*, yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman.

Visi dan misi ini secara sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, *Ulul Albab* berdasarkan Al-Qur'an surat Ali 'imran, ayat 190-191 dapat diketahui bahwa visi guru adalah menjadi orang yang memiliki keseimbangan antara daya pikir, daya nalar dengan daya zikir dan spiritual. Dengan adanya guru yang mempunyai visi ini akan dikembangkan menuju daya untuk melaksanakan *amar ma'ruf* (perintah mengerjakan kebaikan) dan nahi munkar (mencegah kemungkaran). Sehingga visi seorang guru adalah mengembangkan dari aspek spiritual berupa pembangunan mental sampai kepada aspek material, secara langsung untuk mengembangkan keterampilan, baik berkaitan dengan skill, maupun kemampuan sosial lainnya. Hal ini sesuai dengan kompetensi sosial yang disyaratkan sebagai guru profesional. Sehingga dapat dikatakan visi seorang guru adalah membangun dunia menuju tatanan yang lebih baik, lebih damai dan lebih sejahtera. Tanpa peranan pendidikan dan guru didalamnya, tidak akan terwujud perdamaian yang sejati. Kedua, *al-Ulama* dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 27-28 dapat diketahui, bahwa sebagai ulama ia mendalami ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian terhadap alam.

Guru dengan visi sebagai *al-Ulama* mempunyai arti bahwa seorang guru harus mempunyai semangat untuk selalu berkembang, melalui penelitian dan rasa keingintahuannya terhadap bidang yang ia tekuni. Dari semangat untuk selalu berkembang dan belajar ini, harus sampai kepada tingkat seorang ilmuan yang senantiasa takut kepada Allah. Dengan adanya sikap ini seorang guru akan senantiasa berkembang dan selalu bertakwa kepada Allah, dengan hal ini akan tetap sesuai dengan visi pertama dari seorang guru sebagai seorang *Ulul Albab*. Dalam hal ini, sebuah lembaga pendidikan harus mempunyai seorang guru atau bidang tersendiri yang bertugas dalam bidang perdamaian. Sebuah lembaga, biasanya mempunyai humas (hubungan masyarakat), dalam lembaga pendidikan, humas tidak hanya bertugas bagaimana menjalin hubungan baik dengan masyarakat, namun juga sebagai bidang yang

memperhatikan dan menganalisis dengan pisau analisis sosial, sehingga dengan pengamatan dan kerja analisa yang dilakukan, lembaga pendidikan mampu memberikan masukan dan saran bagi sebuah masyarakat yang sedang mengalami problem, atau adanya bersitegang antar kelompok (Setyowati & Ningrum, 2020).

Dengan adanya lembaga yang bertugas di bidang ini, lembaga pendidikan akan mampu mempengaruhi situasi sosial masyarakat, sehingga sebuah lembaga pendidikan akan lebih terpandang dan bisa berperan aktif dalam mewujudkan *civil society*. Ketiga al-Muzakki, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 129, surat Ali 'imran ayat 164. Bahwa visi seorang guru adalah orang yang memiliki mental dan karakter yang mulia. Hal ini sesuai dengan visi dan misi guru profesional yang memiliki kepribadian yang baik, mengembangkannya agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Sehingga seorang guru profesional mampu menjadi contoh yang baik, baik dalam aspek sosial kemasyarakatan dan spiritualnya. Seorang guru tidak boleh menjadi pribadi yang egois dan asosial. Ia merupakan manusia yang menentukan kualitas manusia masa depan. Guru diwajibkan diwajibkan berperan aktif dalam masyarakat, pembangunan sosial, dan menjadi agen perdamaian, karena ia merupakan produk intelektual. Seorang intelektual harus tahu dan bertanggung jawab atas apa yang ia katakan dan lakukan.

Keempat, ahl al-Dzikir dapat ditemukan dalam Al-Qur'an AlAmbiya ayat 7. Bahwa visi seorang guru adalah menjadi orang yang diakui kepakarannya, menguasai ilmu pengetahuan sehingga dan memiliki expert judgment. Pengakuan untuk menjadi otoritas untuk memberikan pembenaran atau pengakuan atas berbagai problematika maupun temuan ilmiah. Sehingga seorang guru harus mempunyai bidang studi yang benar-benar ia tekuni, dengan melakukan studi yang fokus dan tekun, akan sangat membantu guru untuk lebih baik dalam mengembangkan keilmuan yang ia miliki. Kelima, *Rasikhuna fi al-'ilm* dapat ditemui dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 162 merupakan menjadi orang yang memiliki kemampuan bukan hanya pada tahap membaca data atau melihat fakta secara kasat mata, namun mampu memberikan interpretasi atas suatu hal yang terjadi. Sehingga seorang guru tidak akan menyampaikan suatu hal secara tekstual semata, namun bisa memberikan makna atas suatu hal tersebut. Dengan adanya pemberian makna



ini, akan timbul semangat untuk belajar karena senantiasa diberikan suatu pandangan yang baru atas pemaknaan suatu hal (Lickona, 2013).

## **B. Lembaga Pendidikan Sebagai Gerakan Sosial Perdamaian**

Dalam sub bab ini, akan dijelaskan bagaimana mengkonsep pendidikan perdamaian dengan pendekatan teori gerakan sosial. Gerakan sosial memang identik dengan pengerahan massa, sedangkan lembaga pendidikan agak sedikit berbeda, meskipun sama-sama terdiri dari kumpulan individu. Gerakan sosial cenderung menggelorakan suatu tuntutan tertentu, atau aksi. Namun lembaga pendidikan tidak mengenal hal seperti itu. Penulis menilai, penting untuk mengkonsep sebuah pendidikan perdamaian dengan pendekatan gerakan sosial, hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan (Marsono, 2019).

*Pertama*, dengan menggunakan teori ini, akan lebih mendekati konsep penerapan, dari pada hanya konsep akademik. Karena dengan pendekatan ini, akan tersusun bagaimana sebuah aksi pengkampanyean perdamaian dilakukan. *Kedua*, lembaga pendidikan harus menggeser paradigma, dari hanya sebagai lembaga pendidik yang memproduksi intelektual, tapi juga mampu berperan aktif dalam masyarakat, baik dalam usaha perdamaian maupun pengembangan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan harus senantiasa antisipatif dan mengikuti perkembangan zaman, karena zaman senantiasa berubah, tidak hanya kurikulum saja yang harus berubah dan berkembang, tapi juga lembaga sebagai induk juga demikian. *Keempat*, dengan adanya konsep awal tentang lembaga pendidikan sebagai aktor perdamaian ini, diharap mampu dikembangkan menjadi konsep yang lebih jelas dan matang.

Jika konsep ini berhasil diterapkan, kita akan melihat peran guru, tenaga kependidikan akan lebih menyatu dengan masyarakat, memainkan peran, dan akhirnya sikap sosial murid juga akan terasah. Karena mereka juga dididik dengan memahami masyarakat dengan menggunakan analisis sosial. kelima, melihat pluralitas masyarakat yang tinggi, Indonesia yang terdiri dari berpulau-pulau, maka potensi konflik akan selalu ada, disini peran lembaga pendidikan harus memerankan fungsi sebagai lembaga perdamaian. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, polarisasi akibat Pemilu begitu terlihat dalam masyarakat. Dari sini harus ada yang memainkan peran preventif dalam mendidik, dan aksi ke masyarakat agar polarisasi tidak berkepanjangan.

Penulis memahami, bahwa lembaga pendidikan sudah cukup tugas selama ini, namun dengan anggaran 20% dari APBN saya kira kita bisa memaksimalkan anggaran yang begitu besar ini. Konsep ini tentunya tidak sekali jadi, memerlukan proses koreksi, cek and ricek, percobaan-percobaan. Namun hal itu tidak menjadi sebuah masalah besar, ia merupakan sebuah proses yang harus dihadapi, agar jika benar ini menjadi sebuah kebijakan atau paling tidak diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan, ia benarbenar bisa berdampak pada masyarakat. Kesiapan SDM menjadi kunci utama dalam konsep ini, karena guru atau dosen lebih identik dengan mengajar, bukan sebagai analis sosial dan agen perdamaian. Namun jika problem ini bisa dilewati, ia akan menjadi role model bagi dunia. Jika kita berbicara tentang gerakan sosial, ada tiga kunci jika kita ingin memahami gerakan sosial. Pertama, *political opportunity* (kesempatan politik), kedua *framing* (pembingkaiian), dan ketiga, *resources mobilization* (pengerahan sumberdaya).

### ***1. Political Opportunity***

Dalam kesempatan politik, setelah pasca reformasi, Indonesia menatap era baru dan perubahan yang signifikan. Dunia pendidikan juga mengalami perubahan. Pendidikan menjadi lebih bebas dan terbuka untuk mengembangkan dan menyampaikan materi. Kebijakan dalam era ini, ditandai dengan keterbukaan dan kebebasan. Kebijakan ini juga dirasa dalam dunia pendidikan, pendidikan menjadi semakin dinamis setelah adanya desentralisasi, dengan kebijakan ini, setiap wilayah bisa mengembangkan sumber daya dan membangun ciri khas masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan kebijakan pusat. Dalam era ini, Zamroni menyebutnya sebagai demokratisasi pendidikan (Muhali, 2018).

Pada intinya, kesetaraan antar sekolah negeri dan swasta, mengembalikan pendidikan ke tangan kepala sekolah dan mengembalikan pembelajaran ke tangan guru. Era keterbukaan ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan diharapkan mampu memberikan peran sosial kepada masyarakat, tidak hanya menjadi lembaga yang mencetak intelektual, namun lembaganya juga membangun tatanan sosial. Lembaga Perguruan Tinggi memang sudah memainkan peran ini, melalui kebijakan Wakil Rektor III, atau LP2M, yang meskipun belum begitu banyak dampak yang terlihat. Sekolah sebagai

penyumbang mahasiswa di PT, juga harus mencoba hal ini, melalui pemanfaatan Humas dan pembentukan lembaga tersendiri. Ada dua pendekatan untuk pendidikan perdamaian: pendekatan sempit yang berfokus pada sosialisasi untuk perdamaian yang dilakukan di sekolah-sekolah dan pendekatan luas yang berkaitan dengan sosialisasi dan persuasi masyarakat. anggota untuk mendukung proses dan fungsi perdamaian di dalamnya.

Hal ini memfokuskan pada jenis kedua dari pendidikan perdamaian, dengan fokus pada pembangunan repertoar (daftar rencana) baru untuk siswa di sekolah. Mewujudkan kultur perdamaian membutuhkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Sekolah dapat memainkan peran penting dalam membawa perubahan seperti itu, tetapi sekolah hanya merupakan satu agen, dan perubahan sosial yang besar membutuhkan partisipasi lembaga-lembaga politik, sosial, dan budaya, komunikasi massa, kepemimpinan, dan elit. Garis pendidikan perdamaian ini dapat terjadi melalui berbagai metode dan teknik dengan perencanaan yang matang serta melalui tindakan spontan.

Dalam pelaksanaannya, kita bisa mengkonsep kerangka kerja yang saling berkaitan, untuk menguatkan ketahanan sosial. Pertama, *coping capacities*, yaitu kemampuan aktor sosial untuk mengatasi dan menyelesaikan segala macam masalah. Dalam tahap ini, ketika masyarakat mengindikasikan adanya permasalahan, lembaga pendidikan bisa merespon dan berusaha menyelesaikan. Kedua, *adaptive capacities*, yaitu kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menyesuaikan diri dengan tantangan masa depan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, *transformative capacities*, yaitu kemampuan untuk merangkai lembaga yang mendorong kesejahteraan individu dan ketahanan masyarakat yang berkelanjutan terhadap krisis di masa depan. Dengan cara ini, membangun ketahanan sosial, terutama dalam hal kepedulian terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan, dapat dinyatakan sebagai isu politis, tidak hanya teknis. Dalam tahap ini, lembaga pendidikan bertugas sebagai preventif, penguatan masyarakat dan tindakan pertama ketika terjadi sebuah pergolakan dalam masyarakat (Nashihin, 2017).

## **2. Framing**

Proses *framing*, merupakan pembingkai, pembangunan persepsi, menggunakan analisis sosial. Dalam analisisnya terdiri dari beberapa tahap. Pertama adalah diagnosis *framing*, yaitu yang dikonstruksikan dalam sebuah gerakan sosial guna memberikan pemahaman mengenai situasi dan kondisi

yang sifatnya problematik. Kondisi mengenai apa atau siapa yang disalahkan, sehingga membutuhkan adanya suatu perubahan. Dalam level ini, aktor-aktor gerakan sosial mendefinisikan permasalahan-permasalahan apa saja yang menjadi isu utama yang membuat mereka menginginkan adanya perubahan dan kenapa konflik bisa terjadi. Kedua, prognosis *framing*, yaitu artikulasi solusi yang ditawarkan atas persoalan-persoalan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Dalam aktivitas prognosis framing ini, gerakan sosial juga melakukan berbagai penyangkalan atau menjamin kemanjuran dari solusi solusi yang ditawarkan. Terakhir adalah motivational framing, yaitu elaborasi panggilan untuk bergerak atau dasar untuk terlibat dalam usaha memperbaiki keadaan melalui tindakan kolektif

### 3. *Resources Mobilization*

*Resources* sendiri sebenarnya memiliki makna yang begitu luas. *Resources* dapat terdiri dari kekuatan finansial, akses terhadap media, dukungan simpatisan, loyalitas grup. Ia juga bisa terdiri dari kepemilikan ruang atau gedung, pengetahuan (*stock of knowledge*), dan skill (keahlian) yang dimiliki oleh aktor, termasuk di dalamnya ideologi dan nilai gerakan. Proses *resources* merupakan pemanfaatan semua sumberdaya diatas guna mempengaruhi situasi sosial. dalam konteks usaha perdamaian, *resources* merupakan usaha memisahkan dua pihak yang berseteru dengan menggunakan jaringan yang dimiliki, untuk mewujudkan perdamaian negatif. *Resources* juga digunakan dalam usaha mewujudkan perdamaian positif, dengan cara melakukan lobi-lobi terhadap kedua pihak.

Dalam usaha pembangunan masyarakat kembali, *resources* juga sangat diperlukan guna merubah struktur, kebijakan dan penangkapan provokator. Sehingga dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang berperan dalam pembangunan *civil society* dan usaha perdamaian, bisa menggunakan gerakan sosial yang dimodifikasi sedemikian rupa. Hal ini juga mempertegas, lembaga pendidikan bisa menjadi agen perdamaian, jika ia benar-benar serius dalam mewujudkan fungsi sosialnya (Kemendiknas, 2010).

## **Bab 6 Pendidikan Perdamaian Melalui 12 Nilai Perdamaian**

Mencermati kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, konflik terjadi di berbagai tempat. Konflik tersebut terjadi baik karena faktor kehidupan sosial, ideologi, politik, dan lain sebagainya. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik terjadi karena faktor politik yang juga memanfaatkan isu agama. Di tengah situasi yang demikian, pendidikan perdamaian penting karena manusia hidup dalam dunia yang disertai kekerasan. Walau fenomena ini bukan fenomena baru melainkan fenomena yang sudah terjadi lama, komunitas gereja perlu memberi tempat untuk isu ini. Di era pasca-modernitas, penalaran manusia tidak membuat fenomena konflik lenyap, konflik dengan kekerasan tampaknya menjadi semakin besar dan dampaknya juga sangat besar. Selain itu, Tirsa Budiarti mengungkapkan bahwa dalam konteks Indonesia, kekerasan awalnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, lembaga pendidikan, tempat kerja, kemudian terjadi juga dalam hidup bermasyarakat melalui konflik-konflik sosial. Tirsa Budiarti kemudian mencontohkan kasus kerusuhan yang terjadi di Ambon, Poso, Papua dan beberapa tempat lain. Menurut Budiarti, konflik dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, ras, kepentingan, kesenjangan ekonomi, kemudian terjadi pula konflik yang bernuansa agama yang berakhir dengan suatu tindakan kekerasan yang merenggut nyawa (Mughtar & Suryani, 2019).

Pada dasarnya, perbedaan tersebut bukanlah akar masalahnya sebab perbedaan tersebut merupakan kekayaan sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho bahwa masyarakat yang multikultural merupakan kekayaan bangsa. Walau demikian, Nugroho menyadari bahwa kekayaan tersebut sedang berhadapan dengan bahaya segregasi sosial di mana politik identitas mencuat. Kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di berbagai daerah terjadi karena adanya faktor politik identitas yang dijadikan sebagai cara menyerang kelompok lawan. Sinaga mengemukakan bahwa konflik di Indonesia menjadi semakin nyata karena adanya kelompok-kelompok yang intoleran. Menurut Sinaga, sikap intoleran dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan berbangsa di Indonesia yang multikultural.<sup>3</sup> Apabila konflik dibiarkan terus berkepanjangan maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang bersifat multikultural (Solichin, 2012).

### **A. Konflik dan Resolusi Konflik**

Konflik yang terjadi di Indonesia telah mengarah terjadinya kekerasan yang sistematis dan begitu kasat mata, serta kekerasan yang bernuansa agama adalah kekerasan yang paling mengerikan terjadi di negeri ini. Kekerasan yang terjadi di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Mulia terjadi karena berbagai faktor. Salah satu faktor penyebabnya dikemukakan oleh Parsudi Suparlan. Dalam jurnalnya, Parsudi Suparlan menjelaskan faktor terjadinya konflik adalah karena adanya perjuangan individu atau kelompok untuk memenangkan suatu tujuan yang sama-sama ingin dicapai dan dalam konflik tujuannya adalah untuk menghancurkan pihak lain. Perjuangan individu maupun kelompok yang berlebih dapat mengabaikan hadirnya kelompok lain sebagai satu bagian penting dalam membangun bangsa. Jadi konflik merupakan masalah besar yang terjadi di Indonesia dan diperlukan cara damai untuk memecahkan masalah tersebut (Fatmah, 2018).

Karena terjadinya berbagai konflik, maka diperlukan pendidikan perdamaian sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik dalam berbagai bidang. Budiarti mengungkapkan bahwa pendidikan perdamaian diperlukan agar dapat menciptakan perdamaian positif dengan upaya memberi keterampilan untuk mencegah konflik dan kekerasan. Walau demikian, tetap harus disadari bahwa menghilangkan konflik sangat kecil kemungkinannya, tetapi meminimalkan konflik sangat mungkin dilakukan. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meminimalkan konflik adalah dengan adanya pendidikan perdamaian (Nasional, 2011).

Saputra dalam jurnalnya menuliskan: UNICEF mendefinisikan pendidikan kedamaian sebagai proses mempromosikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membawa perubahan perilaku yang akan memungkinkan anak-anak, remaja dan orang dewasa untuk (a) mencegah konflik dan kekerasan, baik terang-terangan dan struktural; (b) untuk menyelesaikan konflik secara damai; dan (c) untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian, apakah pada intrapersonal, interpersonal, antarkelompok, tingkat nasional atau internasional.

Sementara Vita dalam jurnalnya menjelaskan ada dua konsep damai yaitu damai negatif (*negative peace*) yang merujuk pada ketiadaan perang atau kekerasan fisik dan damai positif (*positive peace*) yang merujuk kepada adanya keadilan dan hubungan yang tidak eksploitatif, maupun kesejahteraan

manusia dan lingkungan, demikian juga berkurangnya akar penyebab konflik.<sup>8</sup> Kemudian Nugroho menekankan bahwa konsep perdamaian adalah perdamaian yang bersifat dinamis, progresif (ke masa depan), dan transformatif (ada perubahan), serta diperoleh dengan upaya sengaja secara intensional, termasuk melalui pendidikan yang mendorong atau merangsang potensi-potensi perdamaian dan tidak justru mengembangkan eksklusivitas dan triumphalisme dangkal (J. Musfah, 2012).

Dari beberapa pengertian di atas, pendidikan perdamaian merupakan sebuah proses yang bersifat dinamis, progresif, dan transformatif, serta diperoleh dengan upaya sengaja secara intensional untuk mempromosikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membawa perubahan perilaku, hingga akhirnya dapat mewujudkan terjadinya kesejahteraan manusia dan lingkungan, dan akhirnya mampu meminimalkan akar penyebab konflik. Pendidikan perdamaian merupakan se buah usaha yang kompleks karena mengandung berbagai tujuan yaitu untuk menumbuhkan komitmen, menanamkan rasa cinta akan hadirnya kedamaian, hingga pada akhirnya memungkinkan peserta didiknya melakukan analisis kritis dan menyelesaikan konflik dengan cara damai hingga mereka layak disebut sebagai agen perdamaian. Kompleksitas pendidikan perdamaian terjadi karena pendidikan perdamaian dilaksanakan tidak hanya mencakup hal-hal kognitif melainkan pula aspek afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian pendidikan perdamaian tidak hanya pada tatanan teoritis melainkan pula mencapai pada praktiknya (Ramdhani et al., 2022).

Untuk mewujudkan pendidikan perdamaian, ada berbagai usaha dilakukan baik oleh pemerintah, kelompok masyarakat, dan individual. Dalam usaha mewujudkan perdamaian, ada sebuah usaha Erik Lincoln dan Irfan AmaLee menyusun modul pendidikan perdamaian. Modul tersebut mengemukakan ada dua belas nilai dasar perdamaian yang digunakan sebagai materi dalam kegiatan Peace Generation. Dalam laman websitenya, Irfan AmaLee menjelaskan bahwa Peace Generation di Indonesia bermula dari pertemuan antara Irfan AmaLee dan Eric Lincoln pada tahun 2006 di sebuah kelas Bahasa Inggris, di mana Irfan AmaLee menjadi salah satu murid dari Eric Lincoln di kantor penerbit Mizan. Dalam sesi conversation, Eric Lincoln mengajukan pertanyaan kepada siswa tema tentang perpolitikan dunia dan Irfan AmaLee mengemukakan pendapatnya, termasuk masalah konflik.

Rupanya Eric Lincoln dan Irfan AmaLee sama-sama memiliki ketertarikan pada pendidikan perdamaian untuk anak dan remaja. Itu sebabnya sejak mereka bekerja sama menulis buku modul pendidikan perdamaian interaktif pertama di Indonesia. Modul tersebut, sejak diterbitkan telah diterapkan oleh berbagai organisasi lokal, nasional, maupun internasional seperti UNICEF, World Vision, UNESCO, dll. Penggunaan modul tersebut oleh UNESCO dan UNICEF tidak lepas dari semangat dua lembaga tersebut yang gencar melaksanakan usaha terjadinya pendidikan perdamaian, sebab pendidikan perdamaian memiliki potensi untuk menciptakan suatu budaya damai yang akan menjadi budaya tandingan bagi budaya kekerasan (Heri, 2012).

## **B. Implementasi 12 Nilai Perdamaian dalam Nilai-nilai Perdamaian**

### **1. Membangun Perdamaian dari Diri Sendiri**

Bila mengacu pada nilai-nilai perdamaian yang dikemukakan oleh Lincoln dan AmaLee maka ada dua nilai dasar yang dikemukakan terkait berdamai dengan diri sendiri. Dua nilai dasar tersebut adalah menerima diri dan perbedaan etnis.

#### ***Menerima Diri***

Lincoln dan AmaLee mengemukakan ada lima inti dasar dari prinsip ini. Inti pertama adalah “Setiap orang diciptakan dengan beberapa karakteristik” baik yang positif maupun negatif, serta yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Kedua, setiap orang harus bisa mengubah hal-hal yang bisa diubah, dan belajar menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Ketiga, setiap orang harus mensyukuri kebenaran bahwa dirinya diciptakan oleh Allah yang Mahakuasa dengan suatu tujuan dan Allah tidak pernah salah dalam menciptakan apapun. Keempat, manusia harus memiliki pandangan yang adil dan seimbang tentang diri sendiri. Kelima, tidak memandang rendah diri sehingga tidak mempersulit diri untuk memperoleh banyak teman. Nilai yang dikemukakan oleh Lincoln dan AmaLee dapat menjadi prinsip universal sehingga dapat diterima oleh banyak orang. Bagi pendidikan Kristen, nilai ini perlu diberi penekanan bahwa untuk berdamai dengan orang lain, manusia perlu terlebih dahulu berdamai dengan dirinya sendiri. Untuk berdamai dengan diri sendiri, maka manusia haruslah terlebih dahulu diperdamaikan dengan Allah (Lincoln & Amalee, 2007).



## ***Prasangka***

Dalam berbagai kasus yang terjadi, prasangka menjadi salah satu awal terjadinya konflik. Lincoln dan AmeLee menjelaskan bahwa prasangka berarti bahwa memutuskan atau menghukum seseorang sebelum tahu fakta sebenarnya. Inti dasar prinsip perdamaian terkait prasangka adalah setiap orang perlu belajar untuk melihat setiap orang sebagai individu. Jadi, setiap manusia tidak boleh dicap baik atau buruk, pintar atau bodoh, kaya atau miskin hanya berdasarkan kesukuan, agama, dan status sosialnya. Yang melandasi prinsip perdamaian ini adalah setiap orang memiliki hak untuk memiliki identitasnya sendiri, bukan karena golongannya. Harus diingat bahwa setiap manusia tidak dapat memilih lahir dalam keluarga apa, suku apa, maupun status sosial, itu berarti bahwa setiap manusia lahir dalam derajat yang sama.

Lincoln dan AmaLee memberi penegasan bahwa prasangka yang buruk menyebabkan dipersempitnya ruang lingkup pergaulan. Selain itu, prasangka buruk merupakan ciri kepicikan berpikir, sehingga terjebak dalam prasangkanya sendiri. Selain itu, dalam laman [peace-generation.org](http://peace-generation.org) dituliskan bahwa “Karena kekerasan diawali dengan kondisi yang tidak saling memahami.” Senada dengan itu, Juditha menjelaskan bahwa prasangka muncul dari kondisi yang tidak saling kenal, tetapi Juditha mengemukakan bahwa prasangka juga muncul karena adanya kekhawatiran yang berwujud stereotif, kesenjangan sosial, serta adanya sikap diskriminasi terhadap suku lain. Itu berarti situasi yang tidak saling kenal dapat menyebabkan adanya prasangka yang kemudian menimbulkan terjadinya kekerasan.

## **2. Meminimalkan Hambatan Menuju Perdamaian**

Nilai-nilai dalam bagian ini terkait dengan dua nilai yang telah dikemukakan sebelumnya. Keragaman Etnis Perbedaan etnis merupakan isu identitas yang terjadi pada masa kini. Dalam beberapa kasus, perbedaan warna kulit, bentuk mata, maupun rambut menjadi masalah yang menimbulkan kesenjangan antar kelompok. Kelompok yang satu merasa lebih unggul dari kelompok lainnya. Lincoln dan AmeLee dalam bukunya mengemukakan bahwa prinsip penting dalam perdamaian adalah menghindari kecenderungan berprasangka buruk terhadap suku-suku lain dan berusaha untuk mengenali serta menikmati perbedaan. Nilai ini dalam perspektif dikemukakan pula oleh Zainiyati. Zainiyati yang menjelaskan bahwa dengan membangun pemahaman yang baik akan orang lain dan adanya keberagaman maka nilai-

nilai universal yang ada dalam agama seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan, perdamaian dan kesejahteraan umat manusia dapat ditegakkan.

Lincoln dan Amalee mengemukakan ada lima hal penting terkait perbedaan suku, yaitu: Pertama, perbedaan suku bukan untuk saling memerangi, melainkan untuk saling memahami; Kedua, setiap suku memiliki keunikannya masing-masing, yang mana dalam setiap adat dan kebudayaan, terdapat hal-hal yang baik maupun kurang baik atau memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing; Ketiga, semua manusia pada dasarnya diciptakan sama di hadapan Allah. Allah tidak menciptakan manusia yang satu paling baik dan yang lainnya kurang baik, oleh karena itu tidak ada suku yang paling unggul atau kurang unggul; Keempat, prasangka yang buruk dan ketidaktahuan sering kali memperkeruh pikiran orang yang satu terhadap yang lainnya; Kelima, prasangka buruk dapat diatasi dengan menjalin hubungan silaturahmi dengan orang dari suku lain. Rumbi menjelaskan bahwa sikap mau menghargai merupakan kunci penting dalam menciptakan perdamaian. Sikap menghargai dapat meminimalkan adanya prasangka buruk yang dapat memicu konflik.

### **3. Perbedaan Agama**

Salah satu penyebab adanya konflik di Indonesia adalah masyarakat belum cukup mampu untuk menerima adanya perbedaan, termasuk juga perbedaan keagamaan. Dalam upaya menghadirkan perdamaian, perlu kesadaran akan keberagaman, termasuk beragam agama. Setiap orang tidak dapat dipaksakan untuk memeluk satu agama, melainkan dengan kerelaan dirinya sendiri menganut satu agama. Prinsip universal yang ditekankan oleh Lincoln dan AmaLee adalah Pertama, tidak ada satu pun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat; Kedua, ada banyak kemiripan dalam agama-agama; Ketiga, ada perbedaan mendasar yang diajarkan agama, misalnya tentang surga, kitab suci, termasuk tentang para nabi; Keempat, membuktikan kebenaran agama dalam praktik keseharian, berbicara keyakinan secara dialogis dan saling menghormati lebih baik daripada menghabiskan waktu dengan saling menjelekkkan, menindas, dan melawan satu sama lain; Kelima, tidak boleh menggunakan kekerasan untuk memaksa seseorang menganut dan melawan satu sama lain.

### **4. Perbedaan Jenis Kelamin**

Ada dua prinsip penting dalam nilai perdamaian ini, yaitu: Pertama, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah secara sepadan, jadi mereka harus saling memperlakukan dengan adil; Kedua, hormati dan hargai hak-hak orang yang berbeda jenis kelamin, bagi laki-laki tidak melakukan pelecehan, diskriminasi, dan intimidasi dengan menggunakan fisik maupun lisan, sementara bagi perempuan tidak mempermainkan laki-laki, membedakan teman baik terhadap laki-laki maupun perempuan, dan menyakiti dengan kata-kata.

## **5. Kaya dan Miskin**

Terkait dengan pendidikan atau penanaman nilai ini, Lincoln dan AmaLee mengungkapkan tiga hal yang penting terkait kaya dan miskin, yaitu: Pertama, jangan menghargai atau tidak menghargai seseorang berdasarkan dengan apa yang mereka miliki, sebab hidup orang tidak bergantung pada hartanya; Kedua, orang kaya maupun miskin sama-sama menghadapi godaan seperti kesombongan, menindas, keserakahan, kurang bergantung pada Tuhan, iri hati, dan suka mengkritik; Ketiga, belajar bergaul dengan orang dari semua tingkat ekonomi, sehingga dapat belajar satu dengan yang lain. Dalam penelitiannya, Rumbi menjelaskan bahwa sikap membedakan, baik strata sosial, kondisi ekonomi dan berbagai perbedaan lainnya dapat memicu terjadinya konflik. Itu sebabnya pendidikan perdamaian perlu menekankan menghargai orang lain yang memiliki perbedaan strata sosial maupun kondisi ekonomi.

## **6. Perbedaan Kelompok**

Eksklusifitas kelompok merupakan salah satu sumber konflik. Oleh karena itu, dalam membangun perdamaian, perlu menyadari bahwa kelompok eksklusif dapat menyakiti sahabat dan dapat menimbulkan banyak kerugian. Kelompok eksklusif dapat menyebabkan timbulnya batasan yang sempit, tidak harmonisnya hubungan satu dengan yang lain, terjadinya perselisihan yang menimbulkan kerugian. Pergaulan dalam kelompok eksklusif mendorong seseorang untuk menyisihkan orang lain yang mungkin berbeda suku, agama, bahasa, dan ras.

## **7. Membangun Jalan Menuju Perdamaian**

Untuk membangun jalan menuju perdamaian, Lincoln dan AmaLee mengemukakan lima jalan. Lima jalan tersebut sejalan dengan nilai-nilai

kekristenan sehingga dapat digunakan untuk menghadapi kekerasan dan konflik. Lima jalan tersebut adalah bagian dari dua belas nilai perdamaian dan dapat digunakan pula dalam pendidikan Kristen untuk perdamaian.

## **8. Memahami Keragaman**

Dari penelitian Sidjabat terhadap tulisan Ismail, tampak jelas jika pendidikan Kristen perlu menekankan adanya kesadaran akan keberagaman. Sikap toleransi terbagun karena adanya pendidikan kemajemukan yang membantu memahami adanya keberagaman. Demikian pula dalam dua belas nilai perdamaian yang dikemukakan oleh Lincoln dan AmaLee, salah satu nilai yang ditekankan adalah memahami keragaman. Lincoln dan AmaLee mengungkapkan bahwa Allah menciptakan beragam hal untuk menjadikan dunia ini lebih indah, oleh sebab itu perbedaan dijadikan untuk saling melengkapi. Untuk dapat bersatu, maka perlu kesadaran akan keragaman sehingga muncul komitmen untuk menghargai yang lain. Lincoln dan AmaLee memberi penegasan bahwa Allahlah yang menciptakan segala sesuatu berbeda agar terjadi saling mengenal satu dengan yang lain.<sup>35</sup> Contoh nilai keragaman yang diangkat oleh Lincoln dan AmaLee adalah Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Bhineka Tunggal Ika adalah budaya nasional yang diangkat dari nilai-nilai budaya di Indonesia. Suparlan menjelaskan bahwa upaya perdamaian harus diangkat pula dari nilai kebudayaan sehingga dapat saling menerima nilai tersebut.

## **9. Memahami Konflik**

Lincoln dan AmaLee menjelaskan bahwa konflik pasti akan muncul, hanya respon terhadap konflik menentukan akibatnya, entah akan menyebabkan hubungan menjadi rusak atau justru menjadikan semakin dewasa. Dalam Alkitab terdapat konflik di Korintus. Menghadapi masalah yang terjadi di Korintus, Paulus tampaknya memulai dengan memahami konflik. Dengan memahami konflik yang terjadi di jemaat Korintus, Paulus kemudian dapat menuliskan sebuah surat yang memberikan pengajaran dan pemecahan masalah. Pendidikan perdamaian juga perlu memasukkan dalam materi maupun kurikulumnya bagaimana memahami konflik.

Lincoln dan AmaLee kemudian mengemukakan ada empat inti pelajaran dari nilai memahami konflik, yaitu: Pertama, harus disadari bahwa konflik pasti akan terjadi dan setiap orang pasti mengalaminya; Kedua, konflik adalah

kesempatan untuk menjadi lebih dewasa, sehingga perlu kecerdasan untuk menyelesaikannya agar hubungan tidak menjadi rusak; Ketiga, bagaimana merespon konflik menentukan akibatnya, apakah akan menyebabkan semakin terjerumus dalam konflik atau justru mengambil jalan damai; Keempat, konflik merupakan situasi yang dapat menjerumuskan pada tindakan ekstrem yang tidak sehat. Lincoln dan AmaLee mendorong agar menggunakan jalan damai untuk menyelesaikan konflik. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah memutuskan untuk memaafkan dan menjauhi konflik, berbicara langsung dengan orang yang berselisih, dan meminta bantuan orang ketiga jika sulit ditangani dengan bicara empat mata.

### **10. Menolak Kekerasan**

Nilai perdamaian kesepuluh yang dikemukakan oleh Lincoln dan AmaLee adalah menolak kekerasan. Dalam buku *Pakai Otak, Jangan Maen Otot*, Lincoln dan AmaLee mengemukakan bahwa konflik menyebabkan menjadi semakin buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, hancurnya berbagai infrastruktur, serta hambatan ekonomi, lebih dari itu, konflik menimbulkan menurunnya kepercayaan dan meningkatnya rasa saling curiga. Alasan penting perlunya membangun nilai menolak kekerasan karena kekerasan menghasilkan tiga dampak buruk, yaitu: Pertama, kekacauan. Kekerasan menyebabkan timbulnya lebih banyak kekerasan lagi dan situasi menjadi tidak terkendali, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan dan kesakitan; Kedua, kehilangan kesempatan untuk berdamai menyebabkan masalah dapat menjadi semakin besar dan semakin parah; Ketiga, perasaan tidak baik pada orang yang terjebak dalam kekerasan akan dipenuhi dengan perasaan takut, bersalah, dan dendam. Lebih jelas Lincoln dan AmaLee mengungkapkan bahwa bila menyelesaikan masalah dengan kekerasan, sama saja mencoba memadamkan api dengan minyak tanah.

### **11. Mengakui Kesalahan**

Lincoln dan AmaLee menjelaskan bahwa konflik tidak akan terselesaikan jika tidak ada pihak yang mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dalam bukunya yang lain, Lincoln dan AmaLee menegaskan bahwa dalam membangun perdamaian, mengakui kesalahan adalah permulaan dari penyelesaian masalah. Kemudian dijelaskan pula oleh Lincoln dan AmaLee bahwa sangat sulit untuk menyelesaikan sebuah konflik, sebab pilihan penyelesaiannya justru dapat mendorong munculnya kemarahan yang

kemudian berdampak pada timbulnya usaha balas dendam dan akhirnya konflik menjadi semakin parah. Prinsip penting dari nilai ini adalah untuk menyelesaikan sebuah konflik, maka terlebih dahulu harus ada kesadaran untuk melihat kesalahan diri sendiri. Lincoln dan AmaLee menegaskan bahwa tidak ada konflik yang terjadi secara sepihak, melainkan melibatkan lebih dari satu pihak dan hampir setiap jalan keluar bermula ketika salah satu pihak mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Konflik tidak akan selesai ketika semua pihak menunggu pihak yang lain untuk meminta maaf. Meminta maaf bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan, tetapi setiap manusia dapat melakukannya dengan pertolongan Allah yang Mahakuasa untuk melakukannya.

## **12. Memberi Maaf**

Pada nilai sebelumnya dikemukakan bahwa meminta maaf penting dalam upaya terjadinya perdamaian. Selanjutnya, memberi maaf juga merupakan nilai penting dalam terjadinya perdamaian. Lincoln dan AmaLee menyebutkan bahwa “Memaafkan adalah keputusan dan pembuka jalan untuk perdamaian.” Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Lincoln dan AmaLee, Christianto dalam penelitiannya menemukan bahwa memaafkan merupakan bagian penting dalam menyelesaikan konflik maupun meminimalkan kembali terjadinya konflik. Ada empat prinsip penting dalam nilai perdamaian ini, yaitu: Pertama, memaafkan tidak harus menunggu merasa enak hati, sebab bila memaafkan dilakukan pada saat diri kecewa akan lebih mulia dibandingkan dalam keadaan biasa; Kedua, memberi maaf berarti memperbaiki kenyataan, bukan menimbun atau menghindari kenyataan. Dengan demikian memaafkan tidak berarti langsung melupakan kesalahan orang lain; Ketiga, memaafkan tidak berarti bahwa tidak ada masalah atau menganggap kesalahan dengan tidak ada masalah. Memaafkan merupakan langkah awal untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban perasaan; Keempat, memaafkan tidak memiliki batas waktu dan tempat, dan memaafkan merupakan cara untuk mencegah terjadinya masalah yang baru.

## **Bab 7 Pendidikan Perdamaian di Peacesantren Welas Asih Garut**

### **A. Profil Peacesantren Welas Asih Garut**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis mendapatkan gambaran tentang profil Peacesantren Welas Asih yang berada di bawah yayasan Inovasi Pendidikan Berkemajuan, berkolaborasi dengan Peace Generation Indonesia untuk pengembangan dan penerapan kurikulum, dalam 12 Penanaman nilai-nilai Perdamaian. Misi dari Peacesantren Welas Asih adalah menciptakan pemimpin masa depan yang berakhlak mulia dan berjiwa social entrepreneur dengan membekali mereka pemahaman agama yang welas asih dan keterampilan perubahan sosial. Welas Asih merupakan tempat belajar dengan tujuan menjadikan para santrinya menjadi peacemaker dan changemaker yang diharapkan mampu meneladani Rasulullah SAW. yang diutus untuk menjadi manusia yang welas asih buat semesta (*rahmatan lil alamiin*), dengan lokasi berada di Griya Sanding Indah Sukarasa, kecamatan Samarang, Garut Kota, Garut, Jawa Barat.

Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Nasional yang dipadupadankan dengan kurikulum Peacesantren Welas Asih. Mata Pelajaran dibagi menjadi tiga rumpun yaitu Tauhid (Aqidah, Ibadah, Quran, Matematika & Sains), Akhlak (Hadist, Sirah, sosial, dan Seni), Ilmu Alat (Bahasa Arab, Bahasa Inggris, komunikasi, literasi, teknologi informasi, dan Olahraga). Pendidikan berbasis *life skills* diterapkan di Peacesantren Welas Asih dengan penekanan *21<sup>st</sup> century skills* yaitu literasi, kompetensi dan karakter, dengan tujuan mampu melahirkan output santri yang berkualitas dan kompetitif. Selain itu pendidikan di Welas Asih didesain untuk membekali santri dalam menghadapi dan memecahkan problema hidup dalam kehidupan nyata. Peacesantren Welas Asih menciptakan proses belajar dengan menciptakan “kultur pembelajaran yang damai”, suatu proses pembelajaran yang menekankan pada penghargaan yang tinggi pada martabat manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna (Lincoln & Amalee, 2007).

Pembelajaran yang jauh dari sifat rasialis, pengembangan kultur dilaksanakan dengan membiasakan sikap-sikap positif. Sumber belajar di Peacesantren Welas Asih adalah belajar pada sumber kehidupan, dimana pendidikan perdamaian harus mampu meningkatkan sumber yang ada pada diri siswa secara optimal. Sumber kehidupan itu antara lain adalah sifat

optimis, motivasi untuk berprestasi, saling memberi perhatian satu dengan yang lain, memiliki harapan dan cita-cita yang tinggi, *creative dan innovative*. Tiga pilar budaya pesantren yang dibangun adalah membantu santri membentuk karakter empati, mandiri, dan berani. Serta santri mampu menjadi seorang *problem solver*, kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. Sesuai dengan hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa santri, dapat disimpulkan bahwa Hasil belajar yang baik, tergantung pada prosesnya.

Jika pengajaran dan bimbingan dilakukan dengan pembiasaan yang konsisten akan menghasilkan pembiasaan yang menginternalisasi di perilaku sehari-harinya. Mengingat masa pandemi anak-anak belajar di rumah, model belajar *blended learning* antara sekolah dan orang tua sangat tepat, sehingga pembiasaan yang baik yang sudah dilakukan setiap hari di asrama, tetap bisa dilakukan secara konsisten di rumah. Ditambah komunikasi antara abah-ambunya, dengan para santri dan orang tua santri tetap terhubung.

Dari hasil pengamatan penulis, proses belajar para santri selama di peacesantren memberi dampak positif dan perubahan perilaku, hampir semua santri merasa nyaman belajar bersama di asrama, karena dari awal santri masuk sudah ditanamkan bagaimana mereka harus saling menghargai, saling menjaga dan saling mendukung. Dari hasil wawancara penulis juga mendapatkan informasi, jika ada santrinya yang masih malu mengungkapkan berbagai perasaannya, santri bisa menulis dan menyampaikan lewat *I message Card* yang disediakan peacesantren, dan bisa digunakan kapanpun, sebagai tindak lanjut diadakan class meeting untuk mediasi, diskusi atau menyelesaikan masalah secara bersama. Tidak ada yang merasa paling pintar karena sistem pembelajaran mereka tidak menggunakan penilaian akademik, capaian hasil belajar yang mereka dapatkan adalah unggul di bidangnya masing-masing (Lincoln & Amalee, 2007).

Sebagai ukuran pencapaian hasil belajar para santri mendapatkan raport. Raport di Peacesantren Welas Asih berbeda dengan raport dari sekolah pada umumnya. Raport dinamai dengan judul Rapot 21st Century Skills menampilkan 21st-Century Skills dengan 3 komponen, yaitu: (1) *Foundational Literacies (How students apply core skills to everyday task)* meliputi: *literacy, numeracy, scientific literacy, ICT Literacy, financial literacy, cultural and civic literacy*, (2) *Competencies (How students approach complex challenges)* meliputi : *critical thinking/problem solving, creativity,*



communication, collaboration, (3) *Character Qualities (How students approach their changing environment)* meliputi: *curiosity, initiative, persistence/grit, adaptability, leadership, social and cultural awareness*. Model belajar yang berbeda dengan sekolah sebelumnya atau dengan sekolah lain, membuat para santri mempunyai pengalaman dan pemahaman baru, bahwa belajar tidak hanya di sekolah, alam raya juga merupakan sumber belajar.

Belajar menjadi sesuatu yang mengasyikan, dan ini menjadi tantangan buat para abah dan ambu untuk terus meningkatkan kreatifitas mencari model dan metode pembelajaran yang tetap mengasyikkan dengan materi pembelajaran tetap bisa diterima dengan baik oleh para santri. Beberapa faktor pendukung dalam capaian penanaman nilai-nilai perdamaian di Peacesantren Welas Asih hasil dari observasi dan wawancara, penulis mendeskripsikan upaya menjadikan Peacesantren menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan tujuannya adalah Peacesantren sangat memperhatikan kualitas abah ambunya untuk terus upgrade pengetahuan dan keterampilan. Peacesantren Welas Asih mempunyai kegiatan dengan nama Welas Asih Abah Ambu academy yaitu pelatihan untuk guru dan pendidik seputar metode pembelajaran kreatif dan interaktif.

Selain itu orang tua wali santri menjadi bagian dari kurikulum (*blended learning*), sebelum santrinya bergabung di peacesantren, orang tua murid harus punya komitmen untuk sama sama menjadi bagian dari proses belajar anaknya. Komitmen dan kerja sama antara sekolah dan orang tua menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan proses belajar. Simbiosis mutualisme ditumbuhkan dan ide besar bersama diwujudkan dalam collaborative parenting untuk pencapaian kemajuan paling optimal bagi santri santrinya menjadi manusia bermanfaat dunia & akhirat. Pendidikan Collaborative parenting adalah kerjasama sekolah dan orangtua dalam mendidik para santri, karena mendidik adalah tugas bersama. Sama sama mempunyai tekad memperbaiki kinerja pengasuhannya. Kolaborasi ini dinamakan Welas Asih Ayah.

## **B. Bunda Academy (WAABA).**

Program kolaborasi yang menjadi salah satu ciri khas pembelajaran di Welas Asih dilakukan juga dengan sekolah lain. Dalam upaya membangun perdamaian dan mengenalkan perbedaan, peacesantren mempunyai program dengan nama collaborative learning. Salah satu program yang sudah dilakukan adalah bekerjasama dengan peacegen.id, yang menginisiasi sebuah program dengan nama Breaking Down the Walls (BDW), BDW merupakan salah satu program PeaceGen sebagai platform perjumpaan dua komunitas yang berbeda untuk saling belajar, mendengarkan, dan menciptakan rasa aman untuk saling berdialog. Dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat di deskripsikan proses penanaman nilai perdamaian dengan penerapan berbagai model dan metode.

Proses pembelajaran dengan tujuan santri santrinya tidak hanya berakhlak namun juga berdampak serta menghasilkan santri yang mampu menjadi problem solver, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Di Peacesantren Welas Asih, santri belajar berbasis proyek untuk memecahkan masalah di kehidupan nyata (*project or problem based learning*), penggunaan metode *Design For Change*, dimana para santri belajar mengenali masalah (*feel*), mampu menggagas solusi (*imagine*), serta mengeksekusi solusi (*do*), dan mampu membagikan solusinya (*share*) kepada masyarakat.

Budaya welas asih harus ditumbuhkan dimana saja, tidak hanya pada saat santri di kelas. Budaya pesantren Welas Asih fokus memperhatikan tiga pilar budaya yang dibiasakan, yang nantinya membantu santri mempunyai karakter empati, mandiri, dan berani. Mampu merumuskan tujuan hidupnya dengan kegiatan *talent mapping & life planning*. Menumbuhkan kedisiplinan tanpa ancaman hukuman, mendampingi anak dengan sistem coaching dan mentoring, menerapkan pendidikan perdamaian dan anti bullying, memberikan perhatian pada kesejahteraan mental (*wellbeingness*) dengan *Social & Emotional Learning* (SEL), serta kerjasama guru dan orangtua dengan Collaborative Parenting. Para pendidik atau coach di Pesantren Welas asih dengan kreatif mengemas metode belajar yang menyenangkan dengan Game Based Learning, menggabungkan kurikulum nasional dengan keterampilan Abad 21, serta memfokuskan materi belajar pada praktik dan pemecahan masalah nyata kehidupan.

Proses menuju pembelajaran, di awal pertemuan para santri dan kedua orang tuanya diberikan kisi kisi assesment terlebih dahulu yaitu dengan poin-

point : Peacesantren Welas Asih akan menjadi tempat buat berkembang, tumbuh dan mencapai The Best Version of yourself, menyediakan bekal dan mengasah keterampilan untuk menjadi Social Entrepreneur, membekali kecakapan abad 21 agar siap menghadapi masa depan. Peacesantren Welas Asih memberi pengertian dan penjelasan bahwa peacesantren Welas Asih bukan Bengkel ketok magic yang bisa memperbaiki atau mengubah diri, tapi para santri sendiri yang akan menjadi pilot untuk dirinya sendiri. Tempat mereka belajar hanya membantu memberi peta dan mendampingi perjalanan para santri menuju masa depan.

Maka jika ada yang akan bergabung belajar di peacesantren Welas Asih harus dipastikan ada kerjasama antara calon santri dan orang tua untuk berlatih membiasakan beberapa sikap, salah satunya adalah disiplin positif, karena di Welas Asih menerapkan sikap disiplin positif, yaitu disiplin yang berasal dari kesadaran diri bukan karena kontrol dari luar. Tidak ada hukuman atau hadiah yang diberlakukan, yang ada adalah konsekwensi logis dan dorongan. Para Guru atau coach atau biasa dipanggil abah dan ambu menerapkan prinsip nilai dasar perdamaian dengan cara yang menyenangkan dan efektif, pembelajaran dinamis, disebut dengan metode TANDUR, yaitu Tumbuhkan minat, Alami prosesnya, Namai inti pelajarannya, Demonstrasikan dengan contoh konkret, Ulangi untuk memperkuat pemahaman, Rayakan, syukuri atas semua proses yang telah dilewati, guru adalah fasilitator. “*TRANSFORMATIVE COACHING*”, adalah model panduan pembinaan di Peacesantren Welas Asih, model panduan ini disusun oleh Irfan Amalee sebagai Mudir Peacesantren Welas Asih. Ada tiga pola pendidikan di dipakai, yaitu Teaching, Training dan Coaching.

Pembinaan di peacesantren Welas Asih menganut 3 Pilar Pembinaan yaitu Disiplin Positif (Pembiasaan positif, membangun kesadaran bukan hukuman, delay gratification yaitu menunda kesenangan, self driving menjadikan santri menjadi pilot untuk dirinya sendiri atau mengendalikan diri), Hubungan Reflektif (Antybully, memahami jenis bullying, empati, peduli, respect, active listening ), Belajar Efektif (Project Based Learning, Problem based Learning, Discovery Learning), santri diarahkan mempunyai cita cita dan minat yang jelas untuk menggerakkan motivasi belajar, Self learning dan digital literacy, menggunakan gadget secara bijak, literasi. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan perdamaian melalui lembaga

pendidikan atau sekolah, sebagai usaha dalam mengurangi tindak kekerasan yang semakin marak. Melihat masih banyak juga pendidik yang belum mengerti apa pendidikan perdamaian, bisa menjadi rekomendasi kepada pemerintah mencari format pendidikan damai yang tidak hanya diperuntukkan para siswa, tapi bagi para pendidik bangsa yang nantinya bertanggung jawab terhadap generasi selanjutnya. Adanya Peacesantren Welas Asih bisa dijadikan percontohan, dan beberapa program di welas asih yang diperuntukkan untuk umum bisa dimanfaatkan untuk diakses. Beberapa konsep, model dan metode yang dikembangkan Peacesantren Welas Asih bisa diadopsi bagi sekolah-sekolah lain dengan menyesuaikan kebutuhan. kepada masyarakat secara umum, termasuk juga di dalamnya lingkungan keluarga, perlu adanya dukungan serta kerjasama, tidak berekspektasi berlebihan kepada sekolah atau lembaga, karena sekolah sebagai sebuah tempat untuk belajar harus melalui proses dan tidak akan menghasilkan sumberdaya yang istimewa secara instan. Setidaknya kedamaian bisa diciptakan dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, diperkuat di lingkungan sekolah atau tempat belajar, dan pada akhirnya mampu ditebarkan di masyarakat luas, bahkan di muka bumi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2016). Kurikulum Pesantren Dalam Perspektif Gus Dur; Suatu Kajian Epistemologis. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 4(2), 227–248.
- Adisusilo, S. (2013). Pembelajaran nilai-nilai karakter. *Jakarta: Rajawali Press Agustina, Susanti.(2013). PerpustakaanPrasekolahku, Seru.*
- Al-Mubarak, Z. (2017). *Membumikan Pendidikan Nilai; Mengumpulkan yang Terserak Menyambung yang Terputus dan Menyatukan yang Tercerai.* Alfabeta.
- Baedowi, A. (2010). Pendidikan Damai dan Resolusi Konflik untuk Sekolah. *Media Indonesia, Senin, 1.*
- Baidhawiy, Z. (2005). *Pendidikan agama berwawasan Multikultural.* Erlangga.
- Bartos, O., & Wehr, Y. (2002). *Using conflict theory.* Cambridge University Press.
- Darmadi, H. (2009). Dasar konsep pendidikan moral. *Bandung: Alfabeta.*
- Djiwandono, J. S. (2000). Globalisasi dan Pendidikan Nilai, dalam Sindhunata. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi, Kanisius, Yogyakarta.*
- Fatmah, N. (2018). Pembentukan karakter dalam pendidikan. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 369–387.
- Fitri, A. Z. (2012). Pendidikan karakter berbasis nilai dan etika di sekolah. *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.*
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization* (Vol. 14). Sage.
- Heri, G. (2012). Pendidikan karakter konsep dan implementasi. *Bandung: Alfabeta*, 7, 31.
- Kemendiknas, R. I. (2010). Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. *Jakarta: Kemendiknas.*
- Kesuma, D., Triatna, C., & Permana, J. (2011). *Pendidikan karakter: kajian teori dan praktik di sekolah.*
- Koesoema, D. (2015). Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh Edisi

Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius.

- Lickona, T. (2013). *Educating for Character*, terj. Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: BumiAksara.
- Lincoln, E., & Amalee, I. (2007). *Peace generation: 12 nilai dasar perdamaian: buku panduan untuk guru*. Pelangi Mizan.
- LSAF. (2021). CAK NUR: ISLAM INKLUSIF, PLURALIS DAN PERDAMAIAN. *Lembaga Studi Agama Dan Filsafat (LSAF)*. <https://www.youtube.com/watch?v=fn-4Vy5uDiE>
- Maes, C. (2020). Response theory: a trajectory-based approach. *Frontiers in Physics*, 8, 229.
- Marsono, M. (2019). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Budaya di Era Milenial. *Prosiding Seminar Nasional Dharma Acarya*, 1(1).
- Muchtar, D., & Suryani, A. (2019). Pendidikan karakter menurut kemendikbud. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 50–57.
- Muhali, M. (2018). Arah Pengembangan Pendidikan Masa Kini Menurut Perspektif Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala*.
- Mulyana, R. (2004). *Mengartikulasikan pendidikan nilai*. Alfabeta.
- Musfah, J. (2012). *Pendidikan holistik: pendekatan lintas perspektif*. Prenada Media.
- Musfah, P. K. (2011). Sebuah Tawaran Model Pendidikan Holistik Integralistik. *Jakarta: Prenada Media*.
- Muthoifin, M. (2016). Sistem Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 61–75.
- Muthoifin, M. (2018). Mengungkap Isi Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Ashr Ayat 1-3. *Proceeding Of The URECOL*, 206–218.
- Nashihin, H. (2017). *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*. Formaci.
- Nasional, K. P. (2011). Panduan pelaksanaan pendidikan karakter. *Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum Dan Perbukuan*.
- Nurjunaedah, N. (2014). Pendidikan Berbasis Nilai (Analisis Teori dan Implementasi). *Jurnal Tarbiyah*, 21(2).
- Nurliani, N. (2016). Studi Psikologi Pendidikan. *Jurnal As-Salam*, 1(2), 39–

- Rahman, M. T. (2021). *Sosiologi Islam*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramdhani, M. A., Sapdi, R. M., Zain, M., Wahid, A., Rochman, A., Azis, I. A., Hayat, B., Bashri, Y., Munir, A., & Anam, K. (2022). Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam. *Cendikia. Kemenag. Go. Id (Nd)*, Accessed March, 29.
- Rosyad, R., Mubarak, M. F., Rahman, M. T., & Huriani, Y. (2021). *Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial*. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Samani, M., & Hariyanto, M. S. (2011). Konsep dan model pendidikan karakter. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Saptono. (2011). Dimensi-dimensi pendidikan karakter, wawasan, strategi, dan langkah praktis. *Salatiga: Esensi Erlangga Group*.
- Setyowati, E., & Ningrum, M. A. (2020). Urgensi Pendidikan Karakter Dan Nasionalisme Bagi Anak Usia Dini. *JP2KG AUD (Jurnal Pendidikan, Pengasuhan, Kesehatan Dan Gizi Anak Usia Dini)*, 1(2), 97–106.
- Solichin, M. (2012). Upaya Pengembangan Pendidikan Entrepreneurship Berbasis Pendidikan Karakter pada Kurikulum Madrasah. *Prosiding Seminas*, 1(2).
- Suryana, Y., & Rusdiana, A. (2015). *Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. Pustaka Setia.
- Trianingsih, R. (2017). Pendidikan dalam Proses Kebudayaan yang Multikultural di Indonesia. *Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam*, 1(1), 1–12.
- Wahid, A. (2006). Islamku Islam Anda Islam Kita. In *Jakarta: The Wahid Institute*.
- Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi Agama*. Prodi P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wihardit, K. (2010). Pendidikan multikultural: suatu konsep, pendekatan dan solusi. *Jurnal Pendidikan*, 11(2), 96–105.
- Wulandari, T. (2010). Menciptakan perdamaian melalui pendidikan perdamaian di sekolah. *Mozaik*, 5(1), 68–83.

Zaqiah, Q. Y., & Rusdiana, A. (2014). *Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Pustaka Setia.



# PEACESANTREN



Buku ini merupakan hasil penelitian pada Lembaga Pendidikan yang mempromosikan perdamaian dalam pengajarannya, yaitu di Peacesantren Welas Asih, Garut. Kegiatan pendidikan perdamaian mempromosikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan membantu orang baik untuk mencegah terjadinya konflik, menyelesaikan konflik secara damai, atau menciptakan kondisi sosial yang kondusif untuk perdamaian. Nilai-nilai inti non-kekerasan dan keadilan sosial merupakan inti dari pendidikan perdamaian. Non-kekerasan diwujudkan melalui nilai-nilai seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan dan kepercayaan. Keadilan sosial diwujudkan dengan prinsip kesetaraan, tanggung jawab, dan solidaritas.



## Prodi S2 Studi Agama-Agama

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Ged. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati  
Bandung  
Jl. Soekarno Hatta Cimincrang Gedebage Bandung  
40292

ISBN 978-623-5401-02-7 (PDF)



9 786235 401027

ISBN 978-623-5401-03-4



9 786235 401034